

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN POLITIK
KEBANGSAAN PADA KONFIGURASI PEMIKIRAN
NAHDLATUL ULAMA
CABANG KABUPATEN PEMALANG
(Analisis Studi sosio politik)**



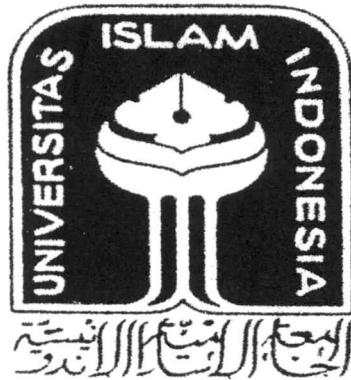
Oleh:

**MUHAMMAD FAESOL
NIM. 03913093**

**TESIS
Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2007**

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN POLITIK
KEBANGSAAN PADA KONFIGURASI PEMIKIRAN
NAHDLATUL ULAMA
CABANG KABUPATEN PEMALANG
(Analisis Studi sosio politik)**



Oleh:

**MUHAMMAD FAESOL
NIM. 03913093**

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2007**



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 144/PS-MSI/Peng./V/2007

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN POLITIK KEBANGSAAN PADA KONFIGURASI PEMIKIRAN NAHDLATUL ULAMA CABANG KABUPATEN PEMALANG (Analisis Studi Sosio Politik)**

Ditulis oleh : Muhammad Faesol

N. I. M. : 03913093

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 18 Mei 2007

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Faesol
Tempat/tgl.lahir : Pemalang, 16 September 1968
N. I. M. : 03913093
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN POLITIK
KEBANGSAAN PADA KONFIGURASI PEMIKIRAN
NAHDLATUL ULAMA CABANG KABUPATEN PEMALANG
(Analisis Studi Sosio Politik)**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2007

Pukul : 14.00–15.00 WIB

Hasil / Nilai : 85 / A



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 326/PS-MSI/ND/V/2007

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN POLITIK
KEBANGSAAN PADA KONFIGURASI PEMIKIRAN
NAHDLATUL ULAMA CABANG KABUPATEN
PEMALANG (Analisis Studi Sosio Politik)**

Ditulis oleh : Muhammad Faesol

NIM : 03913093

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Mei 2007
Ketua Program,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

PERSETUJUAN

**TESIS berjudul “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN
POLITIK KEBANGSAAN PADA KONFIGURASI PEMIKIRAN
NAHDLATUL ULAMA CABANG KABUPATEN PEMALANG
(Analisis Studi Sosio Politik)” yang ditulis oleh MUHAMMAD FAESOL telah
dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia.**



UNIVERSITAS

ISLAM
Yogyakarta, 28 April 2007

Pembimbing,

INDONESIA

Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil ‘alamin, segala puji punya Allah semesta yang senantiasa membimbing dan memberi rahmat terhadap hambanya, khususnya terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah.

Penelitian ini berjudul “Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Politik Kebangsaan pada Konfigurasi Pemikiran Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Pemalang (Analisis Studi Sosio Politik)”. Agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan dunia politik, khususnya jamiyah Nahdlatul Ulama, dan juga sebagai bahan masukan bagi para pengelola pendidikan Islam pada umumnya yang berorientasi pada perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat luas.

Tujuan penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Studi Islam pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Dengan demikian patut kiranya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Suandi Hamid, M.Ec. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS Ketua Program Magister Studi Islam beserta seluruh staf pengajar dan staf administrasi yang telah membantu dan melayani semua kegiatan demi kelancaran perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Kedua orang tua yang telah memberikan do'a restu, sehingga terselesainya studi dan penulisan tesis ini.
5. Istri tercinta dan mutiara hatiku anak-anakku tersayang, yang telah memberikan dukungan sepenuhnya dalam penyelesaian studi ini.
6. Semua rekan-rekan yang telah membantu mendorong dan memberi motivasi dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya penulis hanya berserah diri kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang agar dapat memberikan balasan terhadap mereka. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih sangat diperlukan saran-saran, kritik, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 11 Mei 2007.

Penulis

Muhammad Faesol
NIM. 03913093

ABSTRAKSI :

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN POLITIK KEBANGSAAN PADA KONFIGURASI PEMIKIRAN NAHDLATUL ULAMA CABANG KABUPATEN PEMALANG (Analisis Studi Sosio Politik)

**Oleh :
MUHAMMAD FAESOL
NIM: 03913093**

Dengan kembalinya NU ke khittah 1926 berarti telah menemukan makna strategis untuk lebih mewujudkan kepedulian terhadap sesama dalam memperjuangkan gagasan dan usulan sebagai upaya perubahan kemaslahatan yang lebih baik.

Di tengah perubahan reformasi yang berlangsung selama ini warga Nahdlatul Ulama masih tetap aktif mengemban amanat jamiyah Nahdlatul Ulama yang berarti mereka tetap berkomitmen dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dengan berprinsip pada al huriah (kemerdekaan), al adlu (keadilan), as syuro (demokratis), al musawa (kesamaan posisi) dan tasamuh (toleransi).

Nilai-nilai perjuangan ini ternyata dalam penerapannya sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan politik sehingga konsistensi perjuangan terkadang mengalami stagnasi. Peristiwa benturan fisik dan psikis antar peserta partai politik pasca khittah 1926 pada tahun 1984 telah banyak pernyataan-pernyataan yang memojokkan Nahdlatul Ulama seperti Nahdlatul Ulama tidak berlaku adil dengan partai selain Golkar, pernyataan tidak perlu NU-Nunan yang penting Islam dan terjadi persinggungan fisik antar pendukung partai ketika melaksanakan kampanye.

Hal inilah yang merespon penelitian ini untuk mengungkap nilai-nilai pendidikan politik ketika berhadapan dengan nilai-nilai misi jam'iyah Nahdlatul Ulama pasca khittah 1926 yang mengamanatkan gerakan beramar ma'ruf nahi mungkar.

Studi ini diselenggarakan dengan pendekatan kualitatif naturalistik yang dilakukan pada warga Nahdlatul Ulama dan pengurusnya di cabang NU Kabupaten Pemalang dan beberapa Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan. Dengan teknik yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian ini direkomendasikan untuk lebih memantapkan implementasi nilai-nilai pendidikan politik kebangsaan yang telah digariskan oleh khittah NU 1926, sehingga potensi strategis dari pemikiran khittah NU akan terintegral dengan sumber daya masyarakat dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.

ABSTRAC

IMPLEMENTATION VALUES EDUCATION OF NATIONAL POLITICS [AT] CONFIGURATON IDEA OF NAHDLATUL ULAMA BRANCH SUB- PROVINCE OF PEMALANG (Analysis Study of Sosio Political)

By :

MUHAMMAD FAESOL

NIM : 03913093

With the return of NU to Khittoh 1926 meaning have found meaning of strategis to be more realize caring to humanity in strugeling for proposal draught idea as effort change of better.

In the middle of reformation changes that goes on during the time citizen of Nahdlatul Ulama still active doing trust of jamiyah Nahdlatul Ulama It means they remain to commit in strugeling for human values by principling at al huriyah (independence), al adlu (justice), as syuro (democratic), al musawa (equality of position) and tasamuh (tolerance).

This Struggle values in the reality in its applying often impinge with importances of politics so that struggle consistence sometimes under go stagnation. This research to response values education of politics when dealing with mission values of jam'iyah Nahdlatul Ulama of pasca khittoh 1926 commending movement of amar ma'ruf nahi mungkar.

This study is carried out with approach of naturalistic kualification which done at citizen of Nahdlatul Ulama and official member him in branch of NU Sub-Province of Pemalang and some Official Member Branch of NU District. With technique which is pass interview and observation.

From result of this research is recommended to be more setle values implementation education of national politics which have been marked with lines by NU khittoh 1926, so that strategic potency idea of NU khittoh will be integral with society resource in executing amar ma'ruf nahi munkar.

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Al - Imron : 104)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَكُلُّ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (رواه البخارى)

Artinya :

Tidaklah seorang muslim yang menanam suatu tanaman kemudian makan dari hasilnya, burung, manusia atau binatang tidak lain kecuali menjadi pahala bainya” (H.R. Bukhori)

PERSEMBAHAN

Keharibaan Kedua orang tua

Istri dan ananda tercinta serta segenap keluarga

Semoga Alloh SWT senantiasa melimpahkan Rahman,Rahim dan RidloNya

Atas segala dukungan ,doa dan perhatiannya



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan	10
2. Obyek Penelitian	11
3. Fokus Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Metode Penggalan Data	13

6. Analisis Data	17
7. Teknik Pengolahan Data	19
8. Metode Analisa Data	20
G. Sistematika Penulisan Tesis	21
BAB II SELINTAS TENTANG NU DAN PENDIDIKAN POLITIK	
A. Tinjauan Tentang Nahdlatul Ulama	24
1. Sejarah berdiri dan Perkembangan NU	24
2. Khittah Nahdlatul Ulama	30
3. Dasar-dasar Paham Keagamaan NU	32
4. Sikap Kemasyarakatan	33
5. Perilaku Keagamaan dan Sikap Kemasyaratan Warga NU.....	34
6. Nahdlatul Ulama dan Kehidupan Bernegara	35
B. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama.....	36
C. Tinjauan tentang Pendidikan Politik	37
BAB III GAMBARAN UMUM NAHDLATUL ULAMA CABANG KABUPATEN PEMALANG	
A. Letak Geografis Kabupaten Pemalang	40
B. Sejarah Berdiri dan Perkembangan NU di Pemalang	41
C. Profil Pengurus Cabang NU Pemalang	50
D. Susunan dan Program Kerja PCNU Kabupaten Pemalang ..	59
E. Kehidupan Warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang .	62
F. Kegiatan Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Pemalang...	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	71
1. Nahdlatul Ulama dan Politik Kebangsaan	71
2. Apek Fiqih Dalam Politik	85
B. Pembahasan	89
1. Tingkat Sosial Politik Warga NU Pernalang.....	89
2. Hubungan NU dengan PKB dan Parpol yang lain	90
3. Perubahan Sikap Warga NU Pasca Khittah 1926 dalam Meyikapi Pemilu	93
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meneliti perjalanan NU bahwa konsep khitoh 1926 ternyata tidak lancar dalam penerapan agar sesuai dengan garis khitoh 1926 dalam kehidupan sosial-politik.

Pada genap tiga dasawarsa konsep khitoh NU 1926 diaktualisasikan banyak bermunculan kritik dan gugatan tidak saja dari kalangan outsider, tetapi juga dari kalangan internal NU sendiri. Umumnya gugatan itu lebih diarahkan pada sikap NU di tengah derasnya arus akomodasi dengan pemerintah, tetapi ternyata NU mengambil jarak sehingga tidak mendapat tempat yang prestisius sebagaimana kelompok Islam lain. Kondisi demikian membuat sebagian eksponen NU yang umumnya politisi kecewa dan kemudian mengedepankan kritik.

Dalam rumusan politik NU sangat jelas, keterlibatan dalam kancah politik harus dilihat sebagai bagian strategis dari bangsa, dimana artikulasi politiknya adalah berwawasan kebangsaan menuju intergrasi bangsa, mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis guna menuju terciptanya kemaslahatan bersama. Dalam perkembangannya NU selama kurang lebih 30 tahun telah terbentuk suatu konfigurasi nilai-nilai

budaya yang terstruktur berdasarkan pergumulan dengan politik praktis digeluti secara radikal, sehingga ketika NU mencoba mengaktualisasikan peran politik yang non sektarian dan non partikularistik serta membangun, maka banyak kalangan warga NU tergagap terutama yang masih berkuat secara pribadi dalam jalur politik. Sikap politik seperti ini memang akhirnya menjauhkan NU dari pusat-pusat kekuasaan, tidak ada lagi yang duduk di kabinet dan beberapa gelintir saja yang di lembaga legislatif. Kenyataan ini tentu saja sangat berlainan ketika misalnya NU masih giat dalam kancah politik praktis. Selain itu juga dianggap membahayakan posisi para politisi NU yang tersebar di institusi politik yang tersedia. Ketakutan para politisi ini mendapatkan legitimasi ketika berkembang politik akomodasi terhadap kelompok Islam, dimana NU tidak mendapat jatah, sementara kelompok Islam lain menganggap inilah saatnya melakukan tawar menawar dengan konsensi tertentu.

Realitas ini memberikan dorongan spiritual untuk mengungkit-ungkit konsep khithoh 1926, kemudian memberi daya dorong para politisinya untuk bermain-main lagi dengan politik yang konsensusnya lebih nyata. Karakter NU pasca khithoh 1926 adalah intensitasnya dalam melakukan gerakan tranformasi sosial-cultural bersama-sama dengan semua kekuatan kelompok strategis bangsa. Terobosan kultural dilakukan sedemikian rupa sehingga NU

memainkan posisi yang cukup penting, seperti secara kritis melakukan langkah terobosan yang bersifat sosial kultural dan politik.¹

Langkah-langkah seperti ini memang tidak bisa diukur secara kuantitatif, kegiatan NU berdasarkan konsep khitoh 1926 adalah kegiatan kultural yang ukurannya generasional. Tidak dilihat dari seberapa banyak kursi kekuasaan yang diraih atau seberapa banyak konsesi yang didapat, tetapi bisa didekati dengan seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat bisa bergulir dan seberapa jauh suara kritis NU di dengar dalam menyikapi masalah-masalah yang ada, dan gerakan kultural memang membutuhkan waktu dan tidak bisa diukur hanya dalam satu, dua atau tiga dasawarsa.

Pembaruan dalam dinamika NU pada beberapa tahun terakhir ini telah melampaui batas-batas tradisinya. Kecenderungan ini lantaran adanya kekuatan penggerak dari dalam NU sendiri, dimulai pada generasi Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan berkembang ke generasi di bawahnya, baik yang berada di dalamnya maupun mereka yang berada di luar struktur kepengurusan. Kecenderungan itu menunjukkan NU melakukan gerakan sosial (sosial movement).²

Sejak berdiri tahun 1926 hingga kini Jami'yah NU sepanjang masa mengisi kemerdekaan secara terus menerus berupaya seoptimal mungkin meningkatkan kepekaannya pada beberapa hal yang cukup mendasar. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan. NU mendorong umat agar terbebas

¹ Ilyas Darwis, *Geger di Republik NU*, (Jakarta: Penerbit Harian Kompas-Lakpesdam NU), 1999, hal.165

² el Kapim PBNU, *NU Perekat Bangsa 201-2002*, (ttp, tnp,t.t), hal. 125

dari kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan dan kesengsaraan, NU memfokuskan kegiatan pada pendidikan dan perbaikan, perubahan dan pembaruan sosial secara menyeluruh, terutama mendorong kemampuan swadaya masyarakat sebagai dasar terbangunnya masyarakat tamadun, madani sosial society.³

Dalam kajian dan analisis tentang NU ada beberapa hal yang melatarbelakangi diantaranya pertama karena jumlah umatnya lebih dari 40 juta orang, kedua masih langkanya perhatian yang serius para peneliti yang melakukan studi khusus mengenai hal ini, ketiga warga NU pernah menjadi presiden dan wakil presiden (Gus Dur dan Yusuf Kalla), keempat karena NU terus menerus mencetak pemimpin-pemimpin nasional, kelima munculnya generasi muda NU yang telah mengelaborasi pemikiran-pemikiran keislaman, seperti KIUK (Komunitas Islam Utan Kayu), JIL (Jaringan Islam Liberal) yang dipelopori Ulil Absor Abdala dan JIE (Jaringan Islam Emansipatoris) yang dimotori Masdar Farid Ma'udi.⁴

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi saya dalam kajian tesis yang berjudul Implementasi nilai-nilai pendidikan politik pada konfigurasi pemikiran Nahdatul Ulama adalah yang pertama, adanya perubahan yang menguntungkan Orde Baru berganti orde reformasi, kedua masih adanya komitmen NU terhadap perjuangan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi yakni kemerdekaan (Al Huriyah), keadilan (Al-Adlu), demokrasi (AS-

³ ibid, hal viii

⁴ Muhammad Sodiq, *Dinamika Kepemimpinan NU-Refleksi Perjalanan K.H. Hasyim Muzadi*, Cet.I, (Jawa Timur: Lajnah Talif Wanasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004), hal. xiii

Syura), Kesamaan Posisi (Al-Muswa), dan nilai toleransi (At-Tasamuh) serta dengan merujuk pada perjuangan masa lalu terus pro aktif menyumbangkan gagasan dan usulan dalam rangka perubahan kemaslahatan yang lebih baik, ketiga munculnya tokoh-tokoh pembaharu NU seperti KH.Achmad Sidiq, KH. Abdul Muchit Muzadi, KH. MA. Sahal Mahfudz, KH. Abdurahman Wahid, dan Ulil Absor Abdala, KH. Masdar Mas'ud dll dari pemikiran mereka kaum nahdliyin diharapkan dapat memperoleh pencerahan pemikiran, baik dalam masalah agama, keadilan, demokrasi, keadilan gender dan wawasan kebangsaan.

B. Rumusan Masalah

Sepanjang sejarah NU selalu melakukan gerakan yang terkadang bertentangan dengan negara sebaliknya sering akrab bergandengan, sikap inilah yang menarik perhatian orang karena selalu ada elemen yang menggiatkan di mana kekuatan NU yang sesungguhnya yaitu NU susah dijerat, dipasung pada posisi yang merugikan. Permainan ini membuat NU terbiasa bebas berinteraksi dengan negara tanpa harus membuat komitmen permanen yang mungkin akan membatasinya, lebih jauh lagi karena relasi NU dengan negara itu begitu kompleks sebagaimana aktor yang berperan dalam membentuk bidang politik Indonesia.

Berangkat dari latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah tingkat sosial politik warga NU Cabang Kabupaten Pemalang dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan politik yang digariskan oleh khithoh NU 1926, adakah kesantunan politik yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dalam khithoh NU 1926.
- b. Adakah korelasi politik yang positif atau sinergitas antara arah perjalanan politik di Cabang Kabupaten Pemalang dengan misi dan visi NU sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar
- c. Apakah ada perubahan sosial politik yang lebih baik pasca khithoh 1926 dalam menciptakan civil society di Cabang Kabupaten Pemalang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat sosial politik warga NU Cabang Kabupaten Pemalang dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan politik yang digariskan oleh khithoh NU 1926, adakah kesantunan politik yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemberdayaan umat sebagaimana digariskan dalam khithoh NU 1926.
- b. Untuk mengetahui adakah korelasi positif atau sinergitas arah perjalanan politik di Kabupaten Pemalang dengan misi dan visi NU sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.

- c. Untuk mengetahui apakah ada perubahan sosial politik yang lebih baik pasca khithoh 1926 dalam menciptakan civil society di Cabang Kabupaten Pemalang

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, sebagai petunjuk kajian secara sistematis dalam mendalami, menganalisis dan memahami perubahan politik warga NU dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan politik yang berorientasi pada khithoh NU 1926.
2. Secara praktis,
 - a. Menambah khasanah. Dapat dijadikan rujukan atau landasan konstruktif dalam memperkuat dan memahami politik sebagai media implementasi nilai-nilai pendidikan, wahana perjuangan amar ma'ruf nahi munkar pada tataran dakwah bilyadi, bilhikmah, dan bil hal.
 - b. Sebagai wahana potensi bagi pembaca dalam memperkaya cakrawala pengetahuan tentang pemberdayaan NU dalam memahami perubahan sosial politik sehingga akan lebih efektif dalam mengambil kebijakan-kebijakan mendasar.

D. Telaah Pustaka

Sebagai organisasi yang mengemban fungsi edukatif, NU senantiasa berupaya agar warganya sadar akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara serta sesama umat manusia. Dengan demikian kiprah NU terus menerus mengacu pada bobot perubahan (transformasi), kesetaraan

(emansipasi), keterlibatan (partisipasi), keterpaduan (sinergi) dan kemakmuran atas nilai-nilai spiritual (transendensi) dalam membangun sistem kepribadian, sosial dan sistem budaya bangsa.

Untuk mengetahui upaya ini belum ada pihak lain yang menelusuri dan mengembangkan tawaran-tawaran alternatif dari sistem yang relevan dengan kondisi masyarakat pemalang. Tesis dengan judul Implementasi nilai-nilai pendidikan politik sebuah konfigurasi pemikiran PCNU Pemalang sebuah tinjauan sosial politik merupakan kajian yang pertama kali membahas pada nilai-nilai pendidikan politik sebagaimana digariskan oleh khithoh NU 1926 terhadap gerak langkah masyarakat NU di Pemalang. Sebelumnya pernah ada penelitian tentang NU di pemalang akan tetapi materi kajian terfokus pada sikap pengurus harian PCNU terhadap adanya PKB sebagai bahan pembuatan sekripsi di UNES Semarang pada tahun 1995.

E. Kerangka Teori

Sebagai organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwah). toleransi (al-Tasamuh). kebersamaan dan hidup berdampingan dengan masyarakat yang lain bersama – sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan NU berusaha secara sadar untuk menciptakan warga yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara

Dengan khittah 1926 NU benar-benar menempatkan diri sebagai bagian dari kelompok strategis bangsa yang memilih langkah lebih pada pembangunan bangsa secara luas. Tidak saja tertuju untuk kepentingan sektarian dan primordialitas, tetapi lebih dari itu untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Dengan kiprah pasca khittah 1926 ini tampaknya NU berniat mewujudkan dirinya sebagai rohmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada bentuk-bentuk yang sangat aktual, yaitu praktis dan semata-mata untuk kepentingan kualitas bangsa.

Berkaitan dengan dinamika politik yang ada Nahdlatul Ulama bermain politik pada tingkat tertentu tidak hanya sekedar mencari kursi-kursi politik semata, akan tetapi bagaimana NU bermain politik kebangsaan mempengaruhi partai politik agar dapat mewujudkan peranannya sebagai bagian dari strategi ekebangsaan yang digariskan oleh NU yaitu masyarakat yang berkualitas perubahan (transformasi), kesetaraan (emansipasi), keterlibatan (partisipasi), keterpaduan (sinergi) dan kemakmuran atas nilai-

nilai spiritual (transendensi) dalam membangun sistem kepribadian, sosial dan sistem budaya bangsa.⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis atau metode deskriptif analisis.

Metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang. Dengan demikian gambaran-gambaran yang dituangkan berdasarkan pada kenyataan-kenyataan empiris yang dapat dipahami pada perumusan masalah yang ada.

Metode deskriptif menurut Muh. Nazier adalah “suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”⁶

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antara fenomena. Waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif adalah waktu sekarang.

⁵ Muzadi, Abdul Muchith, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm.33.

⁶ Muh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal.63.

Studi kasus merupakan salah satu dari jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga maupun masarakat. Tujuan penelitian menurut Muh Nazir adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang.sifat-sifat serta faktor yang khas dari kasus⁷ .

2. Obyek Penelitian.

Obyek penelitian merupakan obyek dan sumber data-data atau informasi serta tempat memperoleh data tersebut untuk menyatakan kebenaran penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang akan menjadi obyek penelitian adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pemalang, Pengurs Majelis Wakil Cabang (PMWC) Nahdlatul Ulama Kecamatan dan beberapa tokoh-tokoh NU cabang Kabupaten Pemalang serta beberapa warga tertentu yang dapat menjadi pelengkap data.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah meneliti perilaku warga NU Cabang Kabupaten Pemalang dalam mengimplementasi dalam memahami nilai-nilai pendidikan politik dan implementasinya terhadap dinamika sosial politik yang berorientasi pada khithoh NU 1926.

⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Dirjen Dikti, 1988), hal.25.

Perilaku implementasi nilai-nilai pendidikan politik ini dapat diukur dari tiga aspek:

Yang pertama adalah aspek penerapan nilai-nilai pendidikan politik, adakah kesantunan politik secara dewasa dalam memahami perubahan sosial politik sehingga politik dipandang sebagai media perjuangan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi bukan sebagai alat kekuasaan untuk menginjak yang lemah dan melampiaskan dendam pada lawan politik. **Aspek yang kedua** adalah aspek kesinambungan perubahan politik yang berorientasi dengan misi dan visi NU yang digariskan pada khittah NU 1926. Orientasi tersebut dicermati serta dianalisis untuk mengetahui apakah ada kecenderungan sinergitas politik sebagai wahana dakwah amar ma'ruf nahi munkar bukan sebagai media mencari kekayaan semata, **yang ketiga** adalah aspek perubahan sosial politik yang mengedepankan pada keluhuran cita-cita pembangunan bangsa yang bermartabat dan bermoral menjadi lebih baik dari sebelumnya dan akan memperoleh gambaran yang signifikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tatanan sosial politik warga NU Cabang Kabupaten Pemalang, sehingga akan lebih mudah dalam mengidentifikasi dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan tingkat sosial politik.

4. Sumber Data Penelitian

a. Responden dan informan

Responden adalah orang yang akan diteliti atau menjadi subjek penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Pengurus harian NU tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang terdiri dari suriah dan tanfidziah .

Sedangkan informan adalah orang yang dapat dimintai keterangan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan sesuatu yang akan diteliti. Dalam hal ini yang dijadikan informan adalah meliputi elemen para tokoh NU maupun tokoh yang ada dalam badan otonom NU seperti MUSLIMAT NU, FATAYAT NU, Gerakan Pemuda Ansor (GPANSOR), Ikatan Pelajar NU (IPNU), Ikatan Pelajar putra-putri NU (IPPNU) dan Mustasyar NU (Penasehat) serta beberapa tokoh organisasi yang termasuk dalam lajnah dan pemerhati yang peduli terhadap perkembangan NU.

b. Arsip dan Dokumen

Arsip dan dokumen merupakan sumber data yang cukup penting dalam penelitian kualitatif ini. Arsip dan dokumen dalam hal ini menyangkut sejarah berdiri dan perkembangan Nahdatul Ulama, keputusan-keputusan organisasi NU seperti AD/ART, Program kerja NU Cabang Kabupaten Pemalang, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Penggalan Data

Metode penggalan data ini tidak terlepas dari sumber data yang terkumpul. Berdasarkan sumber data yang telah penulis uraikan sebelumnya. Metode penggalan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara (interview) dipandang sebagaia metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁸

Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara semi structural yaitu mula-mula menanyakan jumlah pertanyaan yang sudah berstruktur kemudian satu persatu dipedalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat meliputi semua variable dengan keterangan-keterangan yang lengkap dan mendalam.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap dua pihak. Interview kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, maka di perlukan teknik pengumpulan data sesuai dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data tersebut terdiri dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

b. Wawancara mendalam

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Jilid I, (Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi

Untuk mendapatkan kedalaman, keutuhan dan ketajaman terhadap objek yang menjadi fokus perhatian, dilakukan wawancara mendalam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bukan hanya mencakup tentang apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, tetapi yang terpenting adalah mengapa. Wawancara dilakukan, bukan hanya bersifat informal, tetapi yang ditekankan adalah berwujud dialog spontan. Dengan wawancara akan diperoleh pesan-pesan verbal dan non verbal. "Pesan verbal kaya akan informasi, sedangkan pesan non verbal kaya akan konteks."⁹ Wawancara mendalam atau wawancara tak struktur bersifat luwes, "susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara disesuaikan dengan kondisi saat wawancara."¹⁰

Wawancara ini dilakukan terhadap semua pihak yang menjadi nara sumber data atau informasi pada berbagai bentuk, jenis, dan tahap kegiatan dalam rangka pembedayaan SDM santri. Dalam pelaksanaan wawancara, penulis dapat berkomunikasi langsung dengan responden. Sehingga mendapatkan penjelasan dan keterangan tentang informasi yang diperlukan. Dengan wawancara penulis akan memperoleh jumlah informasi yang lebih akurat tentang data yang diperlukan.

c. Observasi

⁹ Dedy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), hal.181.

¹⁰ Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), hal.29.

Teknik observasi digunakan untuk mengamati langsung kegiatan warga Nahdlatul Ulama, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu juga mengamati kegiatan beberapa pengurus pada tingkat Cabang maupun MWC (Majlis Wakil Cabang). Observasi ini tidak hanya mengamati gejala-gejala yang ada, tetapi juga melakukan wawancara dalam batas-batas tertentu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh yang diteliti. Dalam pengamatan harus diperhatikan dua hal yaitu informasi (apa yang terjadi) dan konteks (hal yang bertalian). Informasi yang lepas dari konteks akan kehilangan makna. Mengamati sambil berpartisipasi dapat menghasilkan data yang lebih banyak, lebih mendalam dan lebih terinci. Dalam observasi digunakan sebagai alat penyimpulan data. Hal itu perlu dilakukan secara cermat, jujur dan objektif dan terfokus pada data yang relevan. Pengamatan secara langsung ini dilakukan pada berbagai bentuk, jenis, dan tahap kegiatan dalam rangka pemberdayaan SDM warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pematang.

d. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi sangat besar manfaatnya, karena dapat menggambarkan latar belakang mengenai pokok masalah penelitian. Hal ini dapat dijadikan bahan pengecekan atau tri angulasi terhadap kesesuaian data. Studi dokumentasi pada penelitian ini terfokus pada Bab III yaitu profil Nahdlatul Ulama Kabupaten Pematang. Fokus

utama pada latar belakang sejarah PCNU Pemalang dengan mencari dokumen-dokumen lepas yang pernah ditulis para Aktifis NU, para Pengurus Lama, dan ditambah dengan wawancara kepada tokoh-tokoh NU dan badan otonomnya serta beberapa masyarakat pemerhati NU yang dianggap mengetahui atau memahami kronologis pendirian Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pemalang.

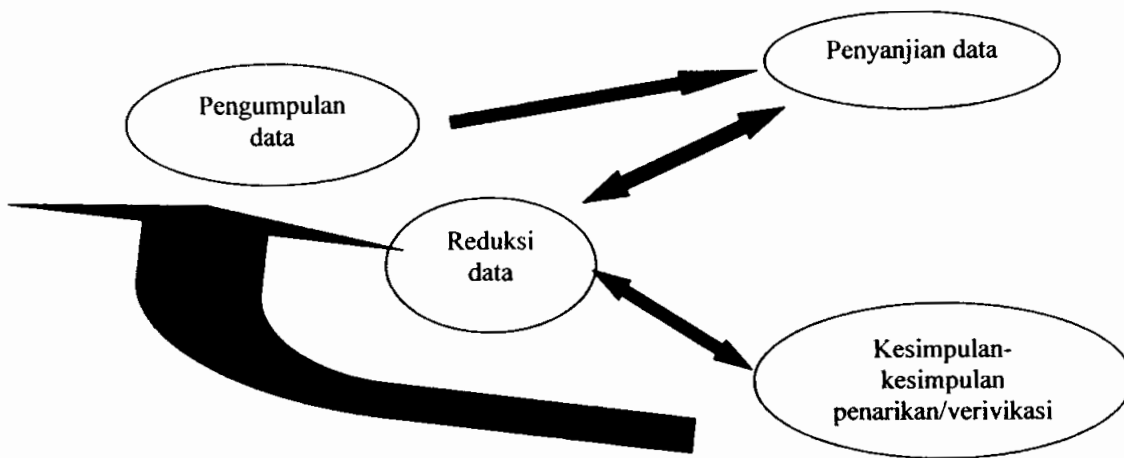
6. Analisis data

Dalam penelitian kualitatif, analisa dilakukan secara terus menerus atau bersifat interaktif. Mulai dari data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Kegiatan analisa data mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hal itu dilakukan dengan mengambil informasi yang sama dari berbagai informasi yang telah dikenal yang mempunyai sifat kejujuran dan terbuka.

Analisa data menurut Miles dan Huberman memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan pemeriksaan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan dan mengumpulkan data sekunder. Merupakan proses siklus dan interaktif. “Peneliti harus siap bergerak di antara empat “sumber” kumpulan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi”¹¹

Kegiatan-kegiatan analisis tersebut digambarkan sebagai berikut :

¹¹ Mills dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal.15.



Sumber : Miles dan Huberman, 1992 : 20

Reduksi data menurut Miles dan Huberman diartikan sebagai “proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis”¹². Pada tiap tahap ini, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema atau polanya. “Jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan”.¹³

Sejak awal penelitian kualitatif, menurut Nasution, peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. “Dari data

¹² ibid hal.19.

¹³ Nasution, op.cit, hal.129.

yang diperoleh sejak awal ia mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu semula masih sangat tentative, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan senantiasa harus direvisi selama penelitian berlangsung”.¹⁴

- a. Observasi, yakni mengamati secara langsung melihat peristiwa yang terjadi di lapangan.
- b. Dokumenter, mengumpulkan data-data dari dokumen dan arsip yang ada.
- c. Angket, Pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden atau pihak yang diteliti.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing Pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah terkumpul, terutama dari sisi kelengkapannya, kejelasannya, kesuaian antara satu data dengan data yang lainnya.
- b. Organizing: Penyusun memastikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah.

¹⁴ ibid, hal.130.

- c. Penemuan hasil penelitian. Pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil organizing dengan menggunakan kaidah/teori, dalil dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.
- d. Teknik Triangulasi : teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu.

Dalam penggunaan teknik triangulasi ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

8. Metode Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian diolah sehingga diperoleh keterangan-keterangan yang berguna selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut berulang-ulang dan terus menerus.

Analisis data kualitatif terdiri tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi, Reduksi data merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Metode Deduktif, yaitu suatu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian diterapkan pada suatu kenyataan atau peristiwa yang bersifat khusus.
3. Metode induktif, yaitu suatu metode pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika tesis ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti atau isi tesis dan bagian akhir.

Bagian awal tesis terdiri dari : halaman judul, abstrak, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi serta daftar tabel.

Pada bagian inti terdiri dari lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, yaitu meliputi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan,

Bab II Landasan teori,

Dalam tinjauan teoritis ini dibahas mengenai deskripsi Nilai-Nilai Pendidikan dan deskripsi politik. Dalam deskripsi nilai-nilai pendidikan memuat teori-teori pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan politik. Setelah itu penulis mengambil satu definisi secara spesifik sebagai acuan dalam

mengambil nilai-nilai pendidikan politik yang ada dalam pemikiran Nahdlatul Ulama pasca khithoh 1926 dan kebijakan-kebijakan yang diputuskan melalui muktamar maupun konggres alim ulama.

Bab III Konfigurasi Pemikiran Nahdlatul Ulama Pasca 1926

Dalam bab ini mengungkapkan Kondisi Nahdlatul Ulama dan kehidupan masyarakat Kabupaten Pemalang, Kegiatan Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Pemalang, Tanggapan terhadap Keberadaan Partai Politik, Sikap dan Partisipasi PCNU Kabupaten Pemalang, Hubungan PCNU dengan PKB dan partai politik yang lain.

Bab IV Analisa Nilai-nilai Pendidikan Politik konfigurasi Pemikiran Nahdlatul Ulama

Dalam bab ini merupakan gambaran pokok dari penelitian yang diharapkan penulis yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat sosial politik warga NU Cabang Kabupaten Pemalang dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan politik yang digariskan oleh khithoh NU 1926, adakah kesantunan politik yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemberdayaan umat sebagaimana digariskan dalam khithoh NU 1926.

Untuk mengetahui adakah korelasi positif atau sinergitas arah perjalanan politik di Kabupaten Pemalang dengan misi dan visi NU sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.

Untuk mengetahui apakah ada perubahan sosial politik yang lebih baik pasca khitoh 1926 dalam menciptakan civil society di Cabang Kabupaten melalui analisis ini diharapkan dapat menjadi rujukan kedepan agar pemberdayaan umat lebih sinergi dengan kebijakan NU dan dapat efektif efisien dalam pencapaian cita cita perwujudan umatan rohmatan lil alamin sesuai dengan visi dan misi Nahdlatul Ulama.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup. Pada bagian ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran atas hasil temuan dari penelitian.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

SELINTAS TENTANG NU DAN PENDIDIKAN POLITIK

A. Tinjauan Tentang Nahdlatul Ulama

1. Sejarah berdiri dan perkembangan NU

Dalam Anggaran Dasar (AD) Nahdlatul Ulama Bab I pasal I disebutkan bahwa : Jam'iyah ini bernama NAHDLATUL ULAMA disingkat NU .Didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M, untuk waktu yang tidak terbatas¹

Latar belakang berdirinya NU adalah kondisi transisi dari keterpurukan umat menuju kepada penyadaran pemahaman keagamaan mengalami puncaknya pada tahun 20-an. Pada tahun 1924 Makkah ditaklukkan oleh Abdal Aziz ibn Sa'ud yang beraliran wahabi. Karena Makkah waktu itu menjadi trend reformasi ajaran Islam dengan menekankan wawasan Islam sebagai falsafah hidup berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. Ibn Sa'ud ketika berkuasa mengalahkan Raja Hijaz (Makkah), Syarief Husein, dan putranya pada tahun 1924, tersebarlah berita bahwa para penguasa baru ini akan menghilangkan madzhab yang ada. Dan untuk mengambil alih komando umat, maka Ibn Sa'ud

¹ Hayat, sholeh dkk, *Pedoman organisasi dan Administrasi Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PWNU Jawa Timur, 2002, hal.79.

merencanakan menggelar Mukhtar Khilafiyah sebagai ganti Daulah Usmaniyah. Waktu itu, seluruh negara Islam di undang melalui perwakilannya, termasuk Indonesia. Awalnya utusan yang direkomendasi adalah HOS Cjokroaminoto (Syarikat Islam), KH.Mas Mansur (Muhammadiyah) serta KH.Wahab Hasbulloh (pesantren). Namun karena tidak mewakili organisasi permanen, maka nama KH.Wahab Hasbulloh diganti. Peristiwa ini menyisakan sakit hati bagi kalangan pesantren karena tidak ada lagi yang dapat dititipi keberatan akan tindakan pemerintah Ibn Saud. Kalangan pesantren sangat tidak menerima sikap penguasa Makkah waktu itu yang anti kebebasan madzhab, anti ziarah makam ulama, anti kegiatan membaca kitab barzanzi dan sebagainya².

Pada abad XIX pada saat santri Indonesia berada di Makkah dan Madinah, di sana sedang berkembang isu tentang pembaharuan yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan paham Wahabi yang pada prinsipnya menghendaki adanya reformasi dan pemurnian ajaran agama Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis serta berupaya membrantas bid'ah dan adat istiadat yang kurang selaras dengan ajaran Islam³. Para ulama yang mengetahui secara langsung ide pembaharuan tersebut adalah mereka yang sedang belajar di Makkah dan Madinah,

² Muhammad Sodik, *Dinamika Kepemimpinan NU Refleksi Perjalanan KH.Hasyim Muzadi*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004), hal.41.

³ Khoirul Fatoni dan M. Zein, *Nahdlatul Ulama Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Media Widyamandala, 1992), hal.2.

diantaranya KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Bisysri Syamsuri, Muhammad Dahlan, Asmawi dan Abbas .

Setelah para ulama tersebut kembali ke Indonesia, mereka berusaha menyebarkan pandangan-pandangan tentang Islam yang mengikuti empat Mahzab yaitu Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Dari keempat mazhab tersebut, madzhab Syafi'ilah yang nantinya banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia melalui pengajaran dan pendidikan di pondok pesantren secara intensif.

Bersamaan dengan itu di Jawa mulai berkembang gerakan pembaharuan Islam dengan semboyan kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Gerakan pembaharuan ini dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan. Di mana beliau mendapat pengaruh pemikiran Muhammad Abduh dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Setelah kembali ke Indonesia KH. Ahmad Dahlan mewujudkan gagasannya dengan mendirikan organisasi sosial keagamaan yang diberi nama Muhammadiyah pada tahun 1912. Kehadiran Muhammadiyah dengan pembaharuan Islam, segera mendapat dukungan dari masyarakat luas .

Untuk mengantisipasi gerakan wahabi tersebut, KH. Wahab Hasbullah, Mansur dan Mangun mencoba membentuk forum/majelis diskusi yang diberi nama Taswirul Afkar (potret pemikiran) di Surabaya tahun 1918. di dalam forum ini dibahas masalah keagamaan dan strategi dalam perjuangan melawan penjajah. Untuk mengembangkan wawasan

keagamaan dengan kelompok tersebut, KH. Wahab Hasbullah menjalin hubungan dengan kelompok intelektual berpendidikan barat yang bernaung di bawah Islam Study Club (ISC). Disamping Taswirul Afkar ini merupakan tempat bertemunya para ulama pesantren yang berpaham Ahlusunnah Wal jama'ah dan wadah pengembangan kader di lingkungan pesantren⁴.

Di sini lain kondisi umat Islam di Indonesia saat itu sering terjadi pertentangan yang tajam antara kelompok pembaharu/kelompok Islam modern dengan kelompok ulama pesantren/kelompok Islam Tradisional⁵. Sumber pertentangan ini menyangkut khilafiyah, seperti soal bermahzab, taklid, kebebasan berjihad serta beberapa hal yang sifatnya furu'. Untuk mencari titik temu antara golongan yang berselisih diadakanlah usaha untuk mempertemukan mereka dalam suatu kongres yang dihadiri berbagai kelompok Islam, yang disebut Kongres Al Islam.

Kongres tersebut semula bertujuan menggalang persatuan umat Islam dan membicarakan strategi dalam menghadapi penjajah, akan tetapi justru malah menjadi ajang pertentangan antara kubu pesantren dan kubu pembaharu

Pertentangan tersebut semakin meruncing ketika Komite Khilafat (komite yang sedianya akan dikirim untuk menghadiri Muktamar Dunia Islam yang diselenggarakan oleh Ibnu Su'ud) tidak dapat menampung

⁴ Ibid, hal.4-5.

⁵ M. Mansyur Amin, 1996:30

aspirasi dunia pesantren. Komite Khilafat ini lebih banyak dikuasai oleh golongan pembaharu daripada golongan pesantren, padahal dengan Komite Khilafat ini merupakan paduan antara golongan pembaharu dengan golongan pesantren. Merasa aspirasinya sudah tidak dapat lagi disalurkan dengan baik, golongan pesantren menyatakan keluar dari Komite Khilafat. Keluarnya golongan ulama pesantren tersebut, dibarengi pula dengan kesiapan mereka untuk membentuk panitia sendiri guna memperjuangkan misi mereka mempertahankan paham Ahlussunnah Wal Jamaah agar tetap berjalan di Indonesia. Maka diadakanlah suatu pertemuan untuk membicarakan langkah yang lebih nyata guna mewujudkan gagasan tersebut.

Pertemuan ulama tersebut berlangsung di rumah KH. Wahab Abdullah di Surabaya pada tanggal 6 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926. Diantara ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah KH. Hasyim Asyari, KH. Masum, KH. Bisysri Syamsuri dan sebagainya. Dalam pertemuan tersebut berhasil mencapai kesepakatan dengan mengeluarkan keputusan yang sangat penting, yaitu: pertama, meresmikan berdirinya “Komite Hijaz”, kedua membentuk suatu jamiyah sebagai wadah persatuan para ulama di dalam tugas memimpin umat Islam, ketiga, membatasi masa kerja Komite Hijaz, hingga pulanginya delegasi dari menjalankan tugasnya ke Mekkah, Komite Hijaz dinyatakan bubar.

Atas usul KH. Al Abdul Aziz, jamiyah yang dibentuk itu diberi nama “Nahdatul Ulama” yang artinya kebangkitan para ulama⁶.

Pada tanggal 31 Januari 1926 NU lahir yang diprakarsai oleh ulama pesantren. Kelahiran NU ini merupakan perwujudan dari tekad para ulama yang bangkit dengan membina persatuan diantara mereka. Disamping bertujuan membina kehidupan Islami secara makro, kebangkitan ulama ini juga sebagai upaya mengantisipasi pesatnya gerakan pembaharuan yang dikhawatirkan mengancam kelestarian paham Ahlusunnah Wal Jamaah.

Sedangkan dalam hal keorganisasian, struktur kepengurusan NU terdiri dari tiga komponen yaitu Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah.

1. Mustasyar, memiliki fungsi sebagai pembina, penasehat dan pembimbing kegiatan NU. Mustasyar ini hanya ada pada tingkat pengurus besar, wilayah dan cabang.
2. Syuriah, merupakan pimpinan tertinggi NU yang berfungsi sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan penentu segala kebijaksanaan jamiyah NU, juga mengemban kewenangan untuk membuat, membimbing, mengarahkan serta mengawasi seluruh kegiatan organisasi.

⁶ Saifudin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), hal.610.

3. Tanfidziyah, berfungsi sebagai pelaksana kegiatan sehari-hari. Karena itu tanfidziyah harus menjalankan petunjuk kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Syuriah.

Disamping itu kepengurusan NU, terbagi dalam beberapa tingkatan sesuai dengan ruang lingkup wilayah yaitu pengurus besar untuk tingkat pusat, pengurus wilayah untuk tingkat propinsi, pengurus cabang untuk tingkat kabupaten/kotamadya, anak cabang untuk tingkat kecamatan dan pengurus ranting untuk tingkat desa/kelurahan.

2. Khittah Nahdlatul Ulama

Khittah artinya garis-garis yang diikuti, garis yang bias ditempuh, garis yang selalu ditempuh. Kalau kata khittah dirangkai dengan Nahdlatul Ulama maka artinya garis yang biasa, yang selalu ditempuh oleh NU, oleh orang-orang NU dalam kiprahnya mewujudkan cita-cita dan dituntun oleh paham keagamaannya sehingga membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama.⁷ Hakikat khittah NU memang tidak cukup dipahami hanya dengan membaca AD/ART NU dan berbagai dokumen yang tidak banyak jumlahnya, karena hakikat khittah NU tumbuh berangsur-angsur dalam proses yang panjang, seiring dengan proses islamisasi yang berlangsung lama sekali, melalui mauidloh hasanah terutama uswatun hasanah para

⁷ Muzadi, Abdul Muchit, Mengenal Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Khalista, 2006), hal.15.

assabiqunal awwalun, para pendahulu, dengan ilmu, amal dan doa disertai keberhasilan dan keikhlasan hati.⁸

Naskah khittah NU sebagai berikut:

- a. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- b. Landasan tersebut adalah faham Islam ahlussunnah wal Jama'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia ,meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
- c. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.

Huruf s di atas menerangkan fungsi khittah NU, huruf b menerangkan substansinya ,sedang huruf c menerangkan bahwa ada unsur lain yang dimasukkan ke dalam khittah NU,yaitu hal-hal yang muncul dalam proses perjalanan perjuangan NU.Bahkan ,khittah NU diumumkan tidak dalam hampa udara,tetapi ada juga pengaruh udara di luar,umpamanya tentang penegasan bahwa NU secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi lain,baik organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan.⁹

⁸ Ibid 16.

⁹ Ibid hal. 18.

3. Dasar-Dasar Paham Keagamaan NU

- a. Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma dan Al-Qiyas
- b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlus Sunnah Waljamaah dan menggunakan jalan pendekatan (al mahdzab):
 1. Di bidang Nahdlatul Ulama mengikuti ahlus sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al Asari dan Imam Mansur Al Maturidi.
 2. Di bidang fiqh Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatam (al Mahdzab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah An Nukman, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal.
 3. Di bidang tasawuf mengikuti antara lain: Imam Al Juanaid Al Bagdadi dan Imam Al Ghozali serta imam-imam yang lain.
- c. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

4. Sikap Kemasyarakatan

Dasar-dasar pendirian Nahdlatul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

d. Sikap Tasamuh dan I'tidal

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan harus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).

e. Sikap Tasamuh

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu atau khilafiyah serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

f. Sikap Tawazun

Sikap seimbang dalam berkhidmat kepada Allah SWT, khidmat kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

g. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak

dan mencegah semua hal yang menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.¹⁰

5. Perilaku Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatan Warga NU

Dasar-dasar NU dalam keagamaan dan kemasyarakatan membentuk perilaku warga NU sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam
- b. Mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi.
- c. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmat serta berjuang
- d. Menjunjung tinggi persaudaraan (al ukhuwah), persatuan (al ittihad) serta kasih mengasihi
- e. Meluhurkan kemulyaan moral (al akhlaq alkarimah), dan menjunjung tinggi kejujuran (ash shidqu) dalam berfikir, bersikap, dan bertindak.
- f. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
- g. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan negara
- h. Menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
- i. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia
- j. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.

¹⁰ Muzadi, Abdul Muchith, *Mengenal Nahdlatul Ulama, Cet, IV* (Surabaya: Khalista, 2006), hal, 49

- k. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama ada beberapa ikhtiar sebagai berikut:

1. Peningkatan silaturahmi/komunikasi/relasi-relasi antar ulama
 2. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian/pendidikan
 3. Peningkatan penyiaran Islam, membangun sarana-saran peribadatan dan pelayanan sosial.
 4. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah.¹¹
6. Nahdlatul dan Kehidupan Bernegara

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan Nasional bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945.

Keberadaan Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya, selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT. Oleh karenanya

¹¹ Ibid, hal. 51.

setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian yang tidak terpisahkan umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwah) toleransi (attasamuh), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bagi bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan Nahdlatul Ulama berusaha secara sadar untuk menciptakan warga negara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.

Nahdlatul Ulama sebagai jamiyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga. Di dalam hal warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus melakukan secara bertanggung jawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum, dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah, dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

B. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama

Dalam rangka kemaslahatan Ihtiarinya Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu dengan fungsi sebagai alat untuk

melakukan koordinasi bagi terciptanya tujuan yang telah ditentukan, baik itu bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah Jamiyah diniyah yang membawa faham keagamaan, maka ulama sebagai mata rantai pembawa paham Islam ahlus sunah waljamaah selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi. Sedang untuk melaksanakan

C. Tinjauan tentang Pendidikan Politik.

Pendidikan politik dapat dan sering dipergunakan sebagai alat untuk melegitimasi ataupun melanggengkan system dan struktur social politik yang ada. Akan tetapi pada saat yang sama juga pendidikan politik dapat berperan penting untuk suatu perubahan atau transformasi social politik menuju ke sistem yang lebih demokratis dan adil¹²

Dari segi bahasa pendidikan dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik; dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik atau pemeliharaan badan, batin dan sebagainya¹³. Secara istilah dalam Undang-undang RI No 2 Th 1989 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang¹⁴

¹² Mansur fakih dkk, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 1999), hlm.xi

¹³ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm.250.

¹⁴ *Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya (UU RI No 2 Th 1989)*, cet IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal.3.

Istilah Pendidikan Politik (Political Education) di Indonesia masih banyak yang memandang bukanlah suatu tema atau konsep yang lazim digunakan dalam kajian-kajian politik kontemporer. Keengganan menggunakan istilah pendidikan politik agaknya berkaitan dengan konotasi negatif yang melekat pada kepentingan-kepentingan politik sesaat yang masih berambisi pada perebutan kekuasaan dan pengumpulan materi semata.

Hubungan antara pendidikan dengan politik bukanlah suatu hal yang baru. Dalam sejarah Islam hubungan antara pendidikan dengan politik juga dapat dilihat sejak masa-masa pertumbuhan paling subur dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sepanjang sejarah terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan politik seperti pada masa dinasti Saljuk di Baghdad, zizam Al-Mulk; di lembaga pendidikan Nidzomiah yang didirikan pada tahun 1064 oleh wazir dinasti Saljuk, di lembaga pendidikan ini terdapat pemikir dan ulama besar seperti Al Ghozali. Signifikasi dan implikasi politik dan pengembangan pendidikan Islam pada umumnya bagi para penguasa muslim sudah jelas.

Madrasah-mdrasah didirikan untuk menunjang kepentingan-kepentingan politik tertentu dari penguasa muslim untuk menciptakan dan memperkokoh citra penguasa sebagai orang-orang yang mempunyai kesolehan, minat dan kepedulian kepada kepentingan umat serta sebagai pembela ortodoksi Islam. Meskipun pendirian madrasah sering berkaitan erat dengan motif-motif politik, terdapat indikasi kuat untuk tidak terlibat dalam proses-proses politik

BAB III
GAMBARAN UMUM NAHDLATUL ULAMA
CABANG KABUPATEN PEMALANG

A. Letak Geografis Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang secara geografis dibatasi :

Sebelah utara	: Laut Jawa
Sebelah selatan	: Kabupaten Purbalingga
Sebelah Barat	: Kabupaten Tegal
Sebelah Timur	: Kabupaten Pekalongan
Bujur Timur (BT)	: $109^{\circ} 17' 30''$ - $109^{\circ} 40' 30''$
Lintang Selatan (LS)	: $8^{\circ} 52' 30''$ - $7^{\circ} 20' 11''$
Memiliki 14 Wilayah Kecamatan dan 222 Desa/Kelurahan	
Dengan luas daerah	: Luas Wilayah 111.530 Ha ¹

Wilayah Kabupaten Pemalang dari arah timur daerah pantura adalah sebelah barat wilayah Kabupaten Pekalongan dan dari arah barat sebelah timur dari Kabupaten Tegal, adapun dari wilayah selatan adalah sebelah utara kabupaten Banjarnegara.

¹ BPS(Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pemalang Jateng, Kabupaten Pemalang dalam Angka 2005,

B. Sejarah Berdiri dan Perkembangan NU di Pemalang

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan NU di Pemalang tidak bisa dilepaskan dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan NU secara nasional. Berdirinya NU cabang Pemalang diperkirakan pada tahun 1934, setelah beberapa tahun sebelumnya yakni pada tahun 1930 diadakan Mukhtar NU di Pekalongan. Tokoh-tokoh yang ikut berjasa mendirikan NU cabang Pemalang diantaranya Kyai Suyad, Haji Ma'ful, Haji Maksudi, KH. Mursidi, KH. Kholil dan lain-lain. Setelah NU cabang Pemalang terbentuk, para tokoh tersebut masuk menjadi pengurus NU yang pertama. Pada saat itu kantor sekretariat pengurus Cabang NU Pemalang berada di desa Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang .

Latar belakang berdirinya NU di Pemalang adalah untuk mendukung berdirinya NU secara nasional. Hal ini diawali dengan adanya surat dari Kyai Hasim Asy'ari yang disampaikan para tokoh ulama di Pemalang diantaranya Kyai Abdul Hamid mengenai gagasan mendirikan NU dan diminta agar Kyai Abdul Hamid ikut membantunya.² Seperti diketahui bahwa saat itu diantara pondok pesantren dan para Kyai mempunyai hubungan batin yang erat sebagai suatu tradisi. Oleh karena itu, ulama dan kyai di Pemalang dengan adanya langkah Kyai Hasim As'ari dengan sendirinya merasa ikut bertanggung jawab mengembangkan NU di Pemalang.

² Wawancara dengan Kyai Zaenal Abidi Noory. Tokoh NU, tanggal 10 Maret 2007

Kehadiran NU di Pemalang ternyata mendapat sambutan positif dari masyarakat Pemalang. Hal ini karena faktor besarnya kharisma para ulama yang mendirikan dan didorong oleh kondisi sebagian besar masyarakat Pemalang yang telah menerima dan mengikuti ajaran Ahlussunnah Wal jama'ah yang berhasil dikembangkan para wali atau sunan sebelumnya. Dalam waktu yang relatif singkat cabang Pemalang berhasil mengembangkan organisasinya. Hal ini tidak terlepas dari peran para kyai yang selalu memiliki suatu perasaan kemasyarakatan yang tinggi dan menghormati tradisi.

Pada awal masa berdirinya, semua gerak langkah NU di Pemalang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu yang masih dalam cengkraman penjajah. Namun garis pokok perjuangan tetap bersifat non kooperatif. Ketika pemerintah Belanda kalah dan meninggalkan Indonesia akibat Perang Dunia II, kemudian tentara Jepang berkuasa di Indonesia dan di seluruh tanah air dinyatakan dalam keadaan perang. Oleh karena itu, semua partai dan organisasi massa termasuk NU dibubarkan oleh Jepang. Kegiatan masyarakat pun dibatasi dan mendapat pengawasan yang ketat dari tentara Dai Nippon (Jepang). Meski demikian para ulama NU masih tetap melaksanakan kegiatan dalam bidang agama seperti mengadakan tabligh dan mendidik anak-anak di pondok pesantren.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka terbebaslah bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa asing. Dengan dimulainya revolusi fisik maka setiap pemuda-pemudi termasuk warga NU

dituntut untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Melalui berbagai gerakan dan institusi NU semua elemennnya ikut bergabung dalam laskar Barisan Sabilillah maupun Laskar Hisbullah tidak mau ketinggalan untuk ikut berjuang.

Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan perjuangan umat Islam pada 7 Nopember 1945 dibentuk federasi dengan nama Masyumi. Anggotanya terdiri dari organisasi Islam yang ada seperti NU, Muhammadiyah, PSII, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI) dan sebagainya. Namun ternyata dalam perkembangannya, Masyumi tidak menunjukkan adanya demokrasi dalam sistem musyawarah bahkan kebijakannya lebih menitikberatkan pada kepentingan politik semata tanpa ada perhatian serius pada persoalan umat yang menyangkut pada sektor ekonomi, pendidikan dan dakwah . Akhirnya pada tahun 1952, NU keluar dari Masyumi dan menyatakan sebagai partai politik Islam.

Sementara itu perkembangan NU di Pemalang semakin mantap setelah diselenggarakan Muktamar NU di Palembang tahun 1952 dengan dibentuknya gerakan pemuda Ansor (GP Ansor). Dengan adanya GP Ansor maka NU cabang Pemalang mulai ditata organisasinya dengan lebih baik. Kepengurusan NU cabang Pemalang mulai bekerja secara efektif yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Wakil Cabang (MWC) di tingkat kecamatan dan Ranting di tingkat desa. Pada masa kepemimpinan yang dipegang oleh Bpk Sunardji sebagai ketua tanfidzi sangat berkembang

dengan pesat, membentuk Pengurus Majelis Wakil Cabang (PMWT) NU. Perkembangan NU pada masa itu sangat didukung oleh masyarakat.

Pada Pemilu I tahun 1955, perolehan suara partai NU di Pemalang berhasil menempati urutan kedua setelah PNI, selanjutnya diikuti oleh PKI, Masyumi dan Partai Buruh.³

Jumlah kursi (DPRD) yang diperoleh masing-masing partai adalah PNI 14 kursi, Partai NU 10 kursi, PKI 9 kursi, Masyumi 1 kursi dan Partai Buruh 1 kursi. Salah satu keberhasilan NU pada masa ini adalah berhasil memilih KH. Mahali dari unsur NU sebagai Kepala Daerah Pemalang sedangkan Ketua DPRD diduduki oleh orang PNI. Perjuangan politik NU di Pemalang dilanjutkan pada masa Orde Baru, dengan ikut serta pada pemilu tahun 1971. Pada waktu itu NU berhasil mencatatkan diri sebagai partai politik yang meraih suara terbanyak kedua setelah Golkar.

Sejak tahun 1973 perjuangan NU tidak lagi mewarnai perpolitikan nasional akibat adanya kebijakan pemerintah Orde Baru menyangkut penyederhanaan partai politik. Pada 5 Januari 1973, NU sebagai partai politik harus bergabung dengan PPP karena sebagai fusi dari empat partai Islam : Parmusi, PSII dan NU.

Setelah mempelajari dan mempertimbangkan situasi di dalam negeri dan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah Orde Baru maka pada tahun 1973 NU memutuskan untuk kembali sebagai jamiyah

³ Wawancara dengan Kyai Zaenal Abidi Noory. Tokoh NU, tanggal 10 Maret 2007

diniyah dimana bidang kegiatannya meliputi pendidikan, sosial dan kegamaan. Sedangkan untuk aspirasi politiknya disalurkan kepada PPP.

Sebenarnya kehidupan kepartaian di Indonesia tidak berjalan mulus. Konflik internal selalu terjadi, baik di tubuh PDI maupun PPP. Persoalan utama adalah belum tuntasnya fungsi partai. Partai hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi secara perseorangan, tetapi secara organisatoris partai pendukung tetap eksis seperti halnya NU dan MI. Selain itu persaingan masing-masing unsur dalam tubuh PPP juga membuat partai ini tidak pernah tentram dan harmonis, lebih-lebih PPP saat PPP dipimpin oleh H.J Naro. Pada periode inilah NU dipinggirkan peranannya di dalam partai.

Melihat kondisi yang kurang menguntungkan ini, ditambah terus berlanjutnya konflik internal terutama antara NU dan MI. maka NU akhirnya mengambil keputusan tegas kembali ke Khittah 1926 dan tidak lagi aktif di gelanggang politik praktis serta menjaga jarak yang sama dengan ketiga kekuatan sosial politik yang ada. Keputusan mendasar yang sangat strategis itu diambil dalam Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984.

Sampai pertengahan tahun 1998, eksistensi Khittah NU tetap bisa dipertahankan. Namun gerakan reformasi yang digulirkan oleh mahasiswa mencapai puncaknya yang ditandai oleh lengsernya Soeharto. Babak perpolitikan Indonesia memasuki tahap baru, yang membuat segala sesuatu serba mungkin dimana selama rezim Soeharto dianggap tidak mungkin. NU sebagai bagian penting kekuatan sosial di Indonesia jelas tidak mungkin

mengabaikan kemungkinan politik yang bisa dimainkan. Maka terjadilah apa yang dinamakan *euphoria* politik, ditandai dengan munculnya partai politik dalam bentuk, corak dan latar belakang yang beragam.

NU tampaknya tidak mau ketinggalan dengan momentum yang sangat menentukan ini, oleh karena itu di kalangan elit NU segera berpikir bagaimana ikut andil dalam transformasi demokrasi.

Persoalannya adalah bagi NU kembali menjadi partai politik jelas tidak mungkin, akan tetapi NU harus bermain peran memanfaatkan pasisi strategis dalam ikut membentuk dan mengisi pembangunan bangsa secara utuh.oleh karena hal itu harus bijaksana mendengar aspirasi warga yang meminta agar NU membentuk partai sebagai penyaluran aspirasi politiknya, tanpa mengganggu ketentuan khithoh 1926 .Sedangkan membiarkan warga NU yang jumlahnya jutaan massa menjadi rebutan partai politik juga bukan suatu langkah yang bijaksana. Bahkan bisa-bisa warga NU akan terambang-ambing dan kehilangan arah yang dikhawatirkan akan melahirkan disintegrasi internal. Dalam hal ini membentuk partai politik yang berakar dan berlatar belakang tradisi NU sebagai penampung aspirasi warga NU, agaknya merupakan jawaban yang paling tepat.

Pada tanggal 29 Rabiul awal 1418 bertepatan tanggal 23 Juli 1998 dideklarasikan sebuah Partai baru bagi warga Nahdliyin yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Segera setelah pemakluman tersebut, PBNU memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan wilayah dan pimpinan cabang,

untuk secepatnya membentuk DPW dan DPC PKB. PBNU memberikan batas waktu pelaksanaan pengurus wilayah hingga tanggal 23 Agustus 1998 dan DPC sampai tanggal 23 September 1998. Sebagai tindak lanjut instruksi tersebut, PCNU Kabupaten Pemalang dalam sebuah surat tugas No.PC.11.23/005/SM/VII/98 : menetapkan dan menugaskan kepada Tim Lima untuk mempersiapkan kelahiran atau partai baru di lingkungan NU. Adapun Tim Lima yang dibentuk oleh PCNU Pemalang terdiri:

- 1) Mu'tamad Arghuby : sebagai ketua/anggota Tim Lima
- 2) Drs. M. Machrus AR : sebagai sekretaris/anggota Tim Lima
- 3) KH. M. Abdus Syakur : sebagai anggota Tim Lima
- 4) KH. Zaenuri Nadi : sebagai anggota Tim Lima
- 5) Zaenal Abidin Noory : sebagai anggota Tim Lima

Setelah melalui proses perumusan, lahirnya Tim Lima berhasil membentuk DPC PKB Pemalang. Untuk sementara waktu kantor sekretariat DPC PKB menggunakan fasilitas PCNU Pemalang. Namun beberapa bulan kemudian pada Mei 1999, secara resmi sekretariat DPC PKB tidak lagi menggunakan fasilitas PCNU Pemalang.⁴ DPC PKB sudah memiliki sekretariat sendiri yang terpisah dari PCNU Pemalang. Menurut beberapa informan, alasan pemindahan kantor sekretariat DPC PKB tersebut adalah untuk menjaga eksistensi NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Secara struktural tidak ada keterkaitan antara NU dengan PKB.

⁴ Wawancara dengan Sopie Sholeh, Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Pemalang, tanggal 27 Februari 2007

Untuk menjaga eksistensi Khittah 1926, pada tanggal 2 Maret 1999 PBNU memberikan instruksi melalui surat edaran Nomor 1096/A.11.02/1999 kepada seluruh warga NU yang isinya diantara lain:

- 1) Jabatan Pengurus Harian NU, Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tidak dapat dirangkap dengan jabatan pada tingkat kepengurusan yang lain, baik dalam jamiyah NU maupun dalam badan otonom.
- 2) Jabatan Pengurus Harian NU, Lembaga, Lajnah, dan Badan Otonom pada semua tingkat kepengurusan tidak dapat dirangkap jabatan pengurus harian organisasi sosial politik dan organisasi yang berafiliasi kepadanya.

Adapun tenggang waktu yang diberikan kepada warga NU untuk memilih karir politik atau organisasi adalah untuk tingkat wilayah dan cabang sampai tanggal 15 April 1999 dan untuk tingkat MWC serta ranting sampai tanggal 30 April 1999. Apabila sampai jangka waktu tersebut belum ada jawaban kepastian, maka PBNU menganggap bahwa yang bersangkutan memilih jabatan di luar lingkungan NU, dengan segala resikonya yakni tidak berhak mengambil keputusan organisasi dan bertindak atas nama NU.

Sebagai tindak lanjut dari intruksi PBNU, maka dalam Pengurus Harian Cabang NU Pemalang ada beberapa orang yang selanjutnya dinonaktifkan akibat rangkap jabatan. Dinataranya KH. Habib Ali Habsyi yang semula Rois Syuriah NU menjadi anggota Dewan Syuro PKB, KH. Zaenuri Nadi yang semula Wakil Katib NU menjadi sekretaris Dewan Syuro

DPC PKB Pemalang, dan Drs. Noor Rosyadi yang semula Wakil Bendahara Tanfidziyah menjadi Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperlihatkan fenomena yang menarik dalam pemilu 1999. Walaupun baru berumur sekitar sembilan bulan ketika mengikuti pemilu, namun PKB di Pemalang ternyata menduduki posisi ke tiga dalam perebutan suara PDI Perjuangan dan PPP. Dengan hasil ini, PKB berhasil mendapatkan 6 kursi dari keseluruhan sebanyak 40 kursi di DPRD II. Partai Golkar sendiri, yang notabene merupakan partai yang telah berpengalaman dalam lima kali pemilu sejak 1977 pasca peleburan partai politik 1973 hanya menempati urutan keempat.

Demikian juga dengan partai-partai baru yang seusia dengan PKB memperoleh suara sangat kecil dan jauh ketinggalan dibandingkan dengan perolehan suara PKB. Dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) bisa dikecualikan karena partai ini termasuk dalam lima besar. Mengenai data perolehan hasil pemilu ke tujuh partai politik yang berhasil mendapatkan kursi DPRD II di Kabupaten Pemalang secara lengkap dapat dibaca dalam tabel berikut:

Tabel 1

Perolehan Hasil Pemilu 1999 di Kabupaten Pemalang

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi (DPRD) II
1	PDI Perjuangan	257.271	16
2	PPP	121.605	8
3	PKB	94.865	6
4	Golkar	92.231	6
5	PAN	31.334	2
6	PNI-FM	3.352	1
7	PBB	3.029	1

Sumber : Rekapitulasi Rincian Hasil Perhitungan Suara Tetap PPD

II Kabupaten Pemalang.⁵

C. Profil Pengurus Cabang NU Pemalang

Berikut ini akan dipaparkan mengenai karekteristik atau profil Pengurus Harian Cabang NU Pemalang yang menjadi responden dalam penelitian ini. pengurus Harian Cabang NU Pemalang relatif tidak homogen, dalam arti menunjukkan kehidupan yang bersifat heterogen.

1) Tentang jenis kelamin

Struktur kepemimpinan NU Cabang Pemalang sebagaimana berlaku secara nasional semuanya ditempati oleh laki-laki karena kaum

⁵ BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pemalang Jateng , *Kabupaten Pemalang dalam Angka 2005*, (Pemalang: BPS Pemda Pemalang, 2006), hal.70.

perempuan terpisah dalam struktur tersendiri melalui organisasi Muslimat NU dan Fatayat NU sebagai badan otonom dari gerakan ini.

Organisasi Muslimat atau Fatayat dan IPPNU (wadah dari kelompok perempuan) sebagai badan otonom dalam NU sinergi dalam kegiatan dan program yang dibangun senantiasa menjadi pionir terdepan dari berbagai kebijakan Nahdlatul Ulama secara Nasional maupun local daerah di Cabang Pemalang. Bersama dengan badan otonom yang lain Nahdlatul Ulama mengawal agenda kegiatan terus menagadakan pembinaan, penyuluhan organisasi dan pengembangan potensi warga di berbagai bidang sebagai mana yang daimanatkan oleh khittah 1926 yaitu membangun umat pada koridor amar ma'ruf nahimungkar, membangun sektor ekonomi, social, budaya, pendidikan dan kesehatan dan peningkatan amal ibadah. Bersama dengan badan otonom yang lain peranan Muslimat NU, IPPNU, badan otonom perempuan dalam NU di Pemalang termasuk cukup giat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sosial, pengelolaan madrasah diniyah dengan TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an) dan kegiatan pengajian ibu-ibu. mengelola berbagai lembaga pendidikan di tingkat pra sekolah seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), YKM (Yayasan Kesejahteraan Masyarakat) Lembaga perbankan seperti BMT (Bank Muamalat) dan Nisa.

Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Pemalang terus berupaya mewujudkan pembangunan dan beragam persoalan yang dihadapi,

terutama pada persoalan pendewasaan berorganisasi sangat rentan terhadap perkembangan dinamika politik nasional, hal ini terasa sekali ketika pemerintah mengadakan pesta demokrasi dan pelaksanaan pilihan kepala daerah di semua tingkatan .

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama beserta jajarannya melihat perkembangan warga ,meninjau langsung ke daerah-daerah (PMWC) dan mencermati kegiatan yang berlangsung di daerah sangat beragam persoalan yang dihadapi, Memahami khithob 1926 memang belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara konsekwen terutama kecenderungan dalam pemahaman sector politik praktis masih banyak yang tingkat pemahamannya cenderung sekedar mengikuti secara cultural .

Pada umumnya warga nahdlatulul ulama kegiatan intensif disektor ibadah, pengkajian kitab-kitab, ceramah agama, sangat maju dan cukup intensif dalam berbagai even mereka sangat antusias, akan tetapi pada sector pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan ,kesehatan dan politik masih banyak ketinggalan. Pengelolaan sector ekonomi di PMWC belum ada yang mengelola secara structural berjama'ah yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama ,mereka mengelola kegiatan perekonomian masih bersifat sendiri-sendiri atau sebuah yayasan belum dikelola langsung oleh Nahdlatul Ulama atau badan otonom yang lain. Sejak tahun 2000 hingga sekarang baru ada dua lembaga ekonomi yaitu BMT yang langsung dikelola oleh organisasi yaitu BMT SAL Fattah yang

dikelola Badan otonom NU yaitu ANSOR Kecamatan Ualujami- Pml di mana permodalan yang dikelola sudah mencapai 900 juta dan Rumag bersalin sebagai Rumag Sakit Islam NU yang dalam opsionalnya direncanakan bulan mei 2007⁶ dan BMT AL Khoir yang dikelola PMWC NU Kecamatan Ampelgding-Pml-dimana opsionaldaa yang bergulir di warga masih sekitar 500 juta⁷. Untuk memnambag alternatif peningkatan ekonomi di cabang kabupaten Pemalang juga telah berdiri PT Patra Bintang sembilan yang opsionalnya direncanakan juga bulan mei 2007 bekerja sama dengan PT Pertamina - Jakarta⁸

Aktifitas warga Nahdlatul Ulama di sektor politik sangat menarik beragam karena tidak semuanya berafiliasi ke satu partai tertentu bahkan ada yang tidak banyak berkecimpung di bidang politik. Walaupun demikian mereka sangat menarik untuk di kaji. Berdasarkan jumlah kursi di DPRD II Kabupaten Pemalang tahun 2004 – 2009 jumlah kursi yang diperebutkan :41 kursi , dengan perolehan kursi sebagai berikut Partai Demokrat (PD) 3 kursi , PDI-P :11 kursi , PPP: 8 kursi , PKB: 8 kursi dan GOLKAR: 9 kursi, PAN : 2 kursi⁹ Pada proses pesta demokrasi tahun 2004 yang lalu banyak kader NU yang menjadi aktifis di berbagai partai ,tentu warga NU banyak menghadapi tawaran ,

⁶ Wawancara dengan Drs.Ahmad Najib, Ketua Pengurus BMT Al Fattah Kecamatan Ulujami, tanggal 22 Maret 2007

⁷ Wawancara dengan Drs.Untoro, Manager BMT Al Khoiriyah Kecamatan Ampelgading, tanggal 15 Maret 2007

⁸ Wawancara dengan KH.Ansori, Manager PT Patra Nusantara, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, tanggal 10 April 2007

⁹ BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pemalang Jateng , *Kabupaten Pemalang dalam Angka 2005*, (Pemalang: BPS Pemda Pemalang, 2006), hal.80.

pandangan program bahkan rayuan dan intervensi politis sebagai upaya meraup suara. Hal ini ternyata dalam hiruk pikuk genderang pasta demokrasi di Kabupaten Pemalang khususnya warga Nahdlatul Ulama cukup tenang sejuk, kondusif tidak banyak terjadi benturan fisik atau kriminal. Dari analisa data bahwa perolehan PPP dan PKB merupakan suara yang diperoleh dari warga nahdlatul ulama karena pemilih yang fanatis karena NUnya ada pada PPP dan PKB namun mereka dalam apresiasi terhadap partainya tidak terjadi benturan fisik dan cukup dewasa dalam menyikapi perbedaan.

Satu hal yang sangat menarik bagi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama adalah ketika pemilu sebelum tahun 2004 pasca khitoh 1926 masih banyak ungkapan sinis terhadap NU seperti NU mengkhianati khitoh 1926 dengan sikap belah seberat terhadap PKB dibandingkan dengan partai yang lain dan kejengkelan mereka dilampiaskan dalam ungkapan tidak usah NU-NU yang penting Islam, sekarang tidak muncul lagi suara sumbang terhadap NU yang sering dilontarkan pada rival PKB. Hal ini dapat dikendalikan berkat harmonisnya hubungan antar pengurus NU di tingkat kabupaten dan jajarannya di tingkat kecamatan dan ranting. Adapun fanatis NU atau partisipan NU yang berafiliasinya ke partai lain pun terasa dewasa tidak banyak yang menghujat atau menjegal lawan-lawan politiknya.

Pada pesta demokrasi pemilihan Presiden dimana tokoh NU yaitu Bpk KH.Hasyim Muzadi dan KH.Solahudin Wahid menjalonkan diri sebagai wakil Presiden ,maka ketengangan warga NU menghangat lagi .Pada masa pilpres di jajaran PCNU Kabupaten Pemalang tidak ada penggiringan formal melalui NU ,akan ntetapi masing–masing pribadi diberi kesempatan menjado tim sukses masing-masing tanpa ada komando langsung secara organisatoris,banhyak pengurus NU di tingkat Cabang maupun MWC yang menjadi tim sukses padsa calon tertentu dan mereka juga diberi kesmpatan tidak aktif di NU dengan dinon aktifkan sampai masa kerja tim sukses dianggap selesai oleh KPU .Pada waktu pilpres Ketua NU Cabang Kabupaten Bpk KH.Zaenuri ikut non aktif dengan beberapa pengurus yang lain menjadi tim sukses Mega Hasyim ini membuktikan adanya partisipasi politis yang bernuansa pendidikan politik bagi waraga NU yang selama ni masih fanatis untuk berorasi secaa egois skarang sudah menjadi hal yang biasa disikapi secara ilmiah, demokratis tanpa meninggalkan substansi perjuangannya dan mampu mengaapresiasikan politik secara santun dan benar sehinga umat / warga langsung mempoleh pengajaran dan pendidikan dalam pendewasaan berpolitik¹⁰

2) Usia Responden

¹⁰ Wawancara , Drs.KH.Maun Mas'ud, Ketua FKB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragam), Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, tanggal 11April 2007

Dari segi usia Pengurus Harian Cabang NU Pemalang sebagaimana direpresentasikan oleh usia responden menunjukkan kecenderungan bahwa sebagian besar yakni 80 % termasuk usia produktif karena berada dalam rentang umur 40 – 60 tahun, sedangkan usia lainnya (20 %) tergolong relatif tua atau usia kurang produktif, kendati mereka di bawah usia 65 tahun. Mengenai data Pengurus Harian Cabang NU Pemalang secara lengkap dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 2
Usia Pengurus Cabang Harian NU Kabupaten Pemalang

Usia (tahun)	Jumlah	Prosentase
40 – 60	8	80
60+	2	20
Total	10	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Responden, 2007

3) Pendidikan

Data tentang pendidikan responden meliputi latar belakang pendidikan umum. Mengenai latar belakang pendidikan umum diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 3

Pendidikan Umum Pengurus Cabang Harian NU

Kabupaten Pematang

Jenjang /Pendidikan	Jumlah	Prosentase
SD / MI	1	10
SLTP/MTs	1	10
SLTA	10	10
D3 / Sarjana Muda	3	30
Sarjana	4	40
Total	10	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Responden, 2007

Tabel 3 menunjukkan bahwa Pengurus Harian Cabang NU Pematang memiliki basis pendidikan umum yang relatif tinggi dan merata yakni 7 orang (70 %) lulusan D3/Sarjana Muda dan Sarjana, dan hanya 10 % lulusan SD. Diantara pengurus Harian Cabang NU Pematang yang menempuh pendidikan jenjang Sarjana Muda (D3) dan Sarjana (S1) itu, sebagian besar lulusan IAIN.

4) Pekerjaan

Berikut ini gambaran tentang status pekerjaan Pengurus Harian Cabang NU Pematang.

Tabel 4

Pekerjaan Pengurus Harian Cabang NU Pemalang

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
Pegawai Negeri Sipil	5	50
Pegawai Swasta	1	10
Wiraswasta	3	30
Tani	1	10
Total	10	1000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Responden, 2007

Proporsi Pengurus Harian Cabang Nu Pemalang yang berlatar belakang pegawai negeri sipil (PNS) menduduki urutan pertama yakni 50 % yang menunjukkan kenyataan besarnya jumlah elit birokrasi dalam NU.

Dari data yang berhasil dielaborasi juga ditemukan informasi lain, bahwa sebagian besar Pengurus Harian Cabang NU Pemalang yang pegawai negeri itu adalah di birokrasi pemerintah baik di lingkungan pengadilan agama, departemen agama ,Diknasmaupun pemda. Beberapa eliti pegawai negeri dari birokrasi pemerintah ini menempati posisi formal yang cukup penting dalam organisasi NU baik di Tanfidziyah maupun di Syuriah.

D. Susunan dan program kerja PCNU Kabupaten Pemalang

Sejak tahun 1989 PCNU Pemalang telah memiliki gedung sendiri sebagai pusat aktifitas dan kesekretariatan. Sebelumnya PCNU Pemalang tidak memiliki gedung yang permanen. Gedung yang berlantai dua tersebut terletak di Jalan Pemuda No, 49 Pemalang, dibangun di atas tanah seluas 1450 m². Tanah yang ditempati PCNU ini sebenarnya merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

Saat ini periode kepengurusan NU cabang Pemalang adalah untuk masa Khidmat 2003 -2008 yang telah terbentuk dan disahkan pada tanggal 12 April 2003 dengan surat keputusan PBNU No. 229 / A.II.04.d / V / 2003. Adapun susunan pengurus cabang NU Kabupaten Pemalang masa Khidmat 2003 – 2008 dapat dilihat pada lampiran.

Secara umum tugas dan wewenang masing-masing pengurus NU adalah sebagai berikut :

1) Mustasyar

- a. Secara kolektif memberikan nasehat kepada pengurus cabang untuk menjaga kemurnian Khittah 1926.
- b. Melakukan fungsi arbitrase (Islam dzati bani)

2) Syuriah

Sebagai pemimpin tertinggi NU yang berfungsi selaku pimpinan pengendali, pengawas dan penentu kebijakan NU.

3) Tanfidziyah

Sebagai pelaksana kepemimpinan organisasi sesuai kebijakan Syuriah dan program kerja hasil Konfercab 1998.

Sedangkan kerja PCNU Kabupaten Pemalang masa khidmat 1998 – 2003, didasarkan pada subtansi keputusan-keputusan Mukhtamar NU ke-29 di Cipasung Jawa barat tahun 1994 dan sesuai dengan keadaan wilayah Kabupaten Pemalang dengan segala ciri demografinya serta basis sosial warga Nahdliyin yang ada. Adapun prioritas program PCNU Pemalang masa khidmat 2003 – 2008 diletakkan pada 6 bidang meliputi :

- 1) Pembinaan organisasi (jamiyah)
- 2) Pendidikan, pengajaran dan budaya
- 3) Ekonomi dan keagamaan
- 4) Pendalaman dan perluasan pemahaman doktrin Aswaja melalui Bahtsul Masail dan Halaqoh
- 5) Pengembangan dakwah
- 6) Pembiayaan Program

1. Pengurus NU Cabang Pemalang sejak berdiri :

1. Tahun 1932 -Rois suriah : K.Su'ud
Ketua tanfidziah : H.Mahful
2. Tahun 1952 – Rois Syuriah : Habib Soleh Browijaya Al Habsyi
Ketua Tnfidziah : Sunarji
3. Tahun 1960 – Rois Syuriah : Habib Soleh Browijoyo Al Habsyi
Tanfidziah : K.Muktamad Ar Ghubi

4. Tahun 1973 Rois Suriah : KH.Tosim Hanafi
Ketua Tanfidziah : K. Khudlori Fatchi
5. Tahun 1975 suriahnya : KH.Tosim Hanafi
Tanfidziah : Fatchuri.BA
6. Tahun 1980 Rois syuriah : KH.Tosim Hanafi
Tanfidziah : Asrosri Saleh ,BA.
7. Tahun 1985 Suriah : KH Tosim Hanafi
Tanfidziah : KH. Muksin US
8. Tahun 1987 Rois suriah : K.H.Irfan fatoni
Tanfidziah : KH. Mudlofar
9. Tahun 1998 Rois Suriah : Habib Ali Al Habsyi
Tanfidziah : KH.Mudlofar
10. Tahun 2003 PLH – : KH.Slamet Zaeni
(KH. Mudlofar meninggal dunia)
11. Tahun 2003 – 2008 Rois syuria : KH.Abdus Sayakur
Wakil : KH Farichin Sahmari
Drs .Ma'un mas'ud , SH
Katib : KDrs .Abdulloh Masduqi
Wakil : K.Ulul Albab
Ketua Tanfidzia : KH. Zaenuri Nadi
Wakil : KH. Dimyati Mustofa,BA
H. Mujahidin.

Drs. H. Mudasir Mas'ud, MAG

Drs.H.Abdur Rosyid

Sekretaris : Muhammad Faesol, S.Ag

Wakil Seketaris : Shofi Soleh ,BA

Bendahara : Drs KH.Mahsis Marfu'

E. Kehidupan warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi jam'iyah (organisasi masa) lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan memajukan paham Islam Ahlussunah waljama'ah, yang pemikirannya di bidang social kemasarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak pada tasamuh (toleran) dan bersifat tawasuth (moderat). Prinsip-prinsip social kemasarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespons berbagai perubahan dilingkungannya, dan sangat toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masarakat plural tanpa terjebak pada ekstrim kiri dan kanan yang secara fondamen sering kali merusak dimensi-dimensi solidaritas sosial dan kemanusiaan di Indonesia seperti, khususnya di Kabupaten Pemalang - Jawa Tengah.

Kehidupan masarakat Kabupaten pemalang nampak Islami, hubungan antar warga masarakat sangat toleran dengan berbagai perbedaan sikap dan pandangan hidupnya. Dapat mewujudkan kondisi yang kondusif tidak terjadi anarkhis di lingkungannya ketika terjadi perbedaan aspirasi, termasuk

perbedaan yang berkaitan dengan aspirasi politik. Indikasi ini menjadi tolak ukur tingkat kedewasaan warga Nahdlatul Ulama dalam menciptakan keseimbangan hidup bermasyarakat, kondisi ini juga menunjukkan tingkat komunitas intelegensi masarakat yang cerdas, mampu mengakomodir kepentingan umat di atas segala kepeningan pribadinya.

Sikap prilaku warga Nahdlatul Ulama masih cukup kuat terlandasi pada kepatuhan terhadap kepemimpinan sosok kiyai / ulam sebagai sentral ketauladanan yang mengembangkan pada kebijakan Nahdlatul Ulama yaitu memiliki sikap tasamuh (toleran), tawasut (menyeimbangkan) kepentingan pribadi dengan kepentingan masarakat (umum).

Warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pemalang tersebar diberbagai daerah ,dengan aktifitasnya yang tersistem secara structural maupun kultural sangat dominan pada ittibak/megikuti terhadap pengurus dan tokoh / Ulama di sekitarnya ¹¹. Dalam mengikuti perbedaan berpolitik setiap berlangsungnya pesta demokrasi, mereka bisa berpartisipasi secara santun. Ketika pemilu yang lalu tokoh sentral PBNU KH. Hasyim Muzadi – mencalonkan dirinya menjadi wakil presiden yang diusung lewat PDI dan KH. Solahudin Wahid sebagai wakil ketua Tanfid PBNU) dicalonkan oleh partai Golkar ternyata di wilayah Kabupaten Pemalang tidak terjadi arogansi politik tertentu yang berlebihan, mereka cukup dewasa, bisa mengendalikan diri¹². Kedewasaan sikap warga

¹¹ Wawancara dengan Mukhlisun , tokoh masarakat Desa Gombong, Kecamatan Belik, Pemalang, tanggal 27 Maret 2007.

¹² Wawancara dengan KH. Mashudi, Ketua MWCNU Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, tanggal, 17 Maret 2007

NU di Pemalang merupakan kondisi strategis bagi pemerintah untuk menngali dan mengembangkan pootensi warganya dalam mewujudkan slogan Pemalang “IKHLAS“ yaitu Pemalang yang berorientasi pada kehidupan yang Indah Komunikatif Hijau Lancar Aman dan Sehat.

F. Kegiatan Nahdlatul Iama Cabang Kabupaten Pemalang

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang dalam aktifitasnya terprogram dalam hasil Konferensi Cabang dimana segala keputusan program kerja satu periode ke depan dirumuskan oleh musyawirin. Agenda kerja yang terprogram dirumuskan oleh penguus melalui musker (Musyawaroh kerja) sekaligus merumuskan perangkat pengurus dari bebeapa lajnah atu seksi .

Nahdlatul Cabang Kabupaten Pemalang memiliki wilayah di tingkat Kecamatan Sejumlah 15 MWC (Majlis Wakil Cabang)¹² dimana masing-masing MWC juga memiliki wilayah tingkat desa / ranting. Dari 15 MWC semuanya aktif berjalan sesuai garis-garis organisasi . Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang beserta PMWC terus intensif dan simultan mengadakan komunikasi organisasi baik formal maupun informal untuk mejalin kebersamaan, kemitraan dan keutuhan pengurus agar tetap kompak mampu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dari barbagai pihak dapat diatasi dengan baik.

¹² Wawancara dengan KH.Zaenuri Nadi, Ketua Tanfidia PCNU Kabupaten .Pemalang Periode 2003-2008, tanggal 3 Maret 2007

Program kerja yang terumuskan merupakan implementasi dari amar ma'ruf nahi mungkar Nahdlatul ulama yang bergerak langsung pada bidang Pendidikan (LP Ma'arif NU), LKKNU (Lembaga Kesehatan dan Kesejahteraan Nahdlatul Ulama), LKKNU (Lembaga Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama), LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama), Lajnah Ma'ahadil Islam NU, Lembaga Dakwah (LDNU), Lajnah Bahsul Masa'il NU dan sebagainya.

PCNU Kabupaten Pemalang sangat peduli terhadap kemajemukan tingkat persoalan warga ,Oleh karena itu gerakan amar ma'ruf nahi mungkar selalu digalakkan melalui berbagai media lembaga maupun beberapa majlis taklim dengan menyesuaikan kondisi masyarakat.

Ketika sibuk menggali potensi untuk amar ma'ruf nahi mungkar sering Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama beserta Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama bahkan Ranting NU menghadapi berbagai kendala yang terkadang bertentangan dengan AD/ART NU .PCNU Kabupaten Pemalang merasa ikut bertanggungjawab terhadap kondusifnya warga NU sehingga dalam setiap kunjungan kerja di MWC-MWC dan ranting-ranting terus mengadakan pembinaan penjelasan tentang peran dan fungsi NU dengan tetap mendasarkan pada khithoh 1926. Menyadari betapa homogennya persoalan yang dihadapi oleh warga cukup rumit maka upaya-upaya yang ditempuh oleh PCNU bekerjasama dengan MWC terus mengadakan komunikasi baik secara formal maupun informal berkoordinasi secara intensif

melalui berbagai kunjungan silaturahmi.memberikan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan aktifitas Nahdlatul Ulama terutama upaya mendewasakan warga terhadap keputusan khittah 1926 .Alhamdulillah pemahaman warga Nahdlatul Ulama di Cabang Kabupaten Pemalang dalam menyikapi khittah 1926 cukup dewasa .

1. Tanggapan Terhadap Keberadaan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

Ketika PBNU telah membidani lahirnya PKB(Partai Kebangkitan Bangsa) maka warga banyak yang berharap kondisi bangsa kedepan akan lebih baik tercipta stabilitas nasional ,meningkat khususnya di bidang politik.

Pada Kamis, 27 Juli 1998 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi NU karena partai politik yang ditunggu-tunggu kehadirannya dideklarasikan di rumah KH. Abdurrahman Wahid (Ketua Umum PBNU) di Ciganjur, Jakarta Selatan.

Kehadiran PKB ternyata mendapat sambutan positif di kalangan Pengurus Cabang NU Kabupaten Pemalang termasuk para responden. tentang kelahiran PKB. Beberapa responden menyambut positif terhadap kelahiran PKB yang difasilitasi oleh PBNU. Kita tahu bahwa pada masa rezim Orde Baru NU sangat disudutkan dan mengalami marginalisasi secara politis. Semenjak berfusi kedalam PPP NU sering dirugikan. Padahal massa NU sebagai penyumbang suara terbesar dalam pemilu.

Maka ketika terjadi reformasi, ada kesempatan yang baik sebagai warga NU untuk mendirikan partai-partai sebagai wadah aspirasi politik warga NU”¹⁴

Pendapat senada juga diungkapkan oleh salah seorang responden, yakni Kyai Drs.d.Abdullah Masduqi¹⁵, Beliau menyambut positif terhadap keberadaan PKB yang difasilitasi oleh PBNU. Hal ini diharapkan dapat menunjang dan mendorong perkembangan NU. Lahirnya PKB merupakan suatu kebutuhan dalam rangka mengembangkan sayap organisasi NU.

Kelahiran PKB tersebut mendapat dukungan secara penuh dari para Pengurus Cabang NU Kabupaten Pemalang. Dukungan responden terhadap keberadaan PKB, ternyata dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Setidaknya ada tiga kecenderungan alasan dari responden mendukung keberadaan PKB. Alasan *pertama*, seperti yang dikemukakan oleh K. Zen Ahmad¹⁶, jelas mendukung terhadap keberadan PKB. Sebagai fungsionaris NU, keberadaan PKB sangat strategis. Di satu sisi NU tetap merupakan organisasi sosial keagamaan, namun di sisi lain warga NU memiliki wadah untuk menampung aspirasi politik warga NU. Alasan

¹⁴ Wawancara dengan KH.Habib Ali Al Habsyi , Mustasyar PCNU Kabupaten Pemalang Periode 2003-2008, tanggal, 24 Januari 2007

¹⁵ Wawancara dk Drs.KH.Abdulloh Masduqi, Pekapontren Kandepag Kabupaten .Pemalang, tanggal 2 Pebruari 2007

¹⁶ Wawancara K.Zen Ahmad Pengasuh PONPES AL Islah, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, tanggal 20 Maret 2007

kedua, mengenai dukungan terhadap PKB, seperti dituturkan oleh Drs.

Ma'un Mas'ud SH, wawancara tanggal 12 Maret 2007.¹⁷

“Sangat mendukung terhadap keberadaan PKB. Alasannya PKB adalah partai politik yang sejalan dengan ajaran Doktrin Aswaja terutama di samping menyangkut landasan ideologis juga memiliki pijakan doktriner dalam lapangan politik. Dari landasan Doktrin teologis, PKB harus dapat mengembangkan ke-Islaman yang berkebangsaan dan kebangsaan yang relegius. Dengan demikian NU sebagai organisasi sosial keagamaan dapat menjalankan politik dalam bingkai budaya. Serta PKB menjalankan politik secara praktis”.

Alasan yang *ketiga* sebagaimana dikemukakan oleh KH.Drs.

Mahsis Marfu¹⁸, ia mendukung terhadap keberadaan PKB. Alasannya PKB merupakan partai politik yang mempunyai platform yang bagus dengan berbasis Nahdlatul Ulama.

Walaupun keberadaan PKB diharapkan sebagai wadah menyalurkan aspirasi politik warga NU, namun demikian semua responden sependapat bahwa PKB bukanlah menjadi satu-satunya wadah menyalurkan aspirasi politik warga NU. Warga NU bebas menyalurkan aspirasi politiknya. Terhadap warga NU yang menyalurkan aspirasi politiknya pada partai politik lain tetap harus diayomi, sebab mereka masih memiliki hubungan batin dengan NU. Berikut pernyataan KH.

Zaenuri Nadi, wawancara tanggal 14 April 2007.¹⁹

“Bahwa PKB bukan merupakan satu-satunya wadah aspirasi politik NU. Setelah NU kembali ke Khittah 1926, maka

¹⁷ Wawancara dengan KH.Drs.Maun Mas'ud SH, Ketua FKUB(Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kabupaten Pemalang, tanggal 12 Maret 2007

¹⁸ Wawancara dengan Drs. KH.Mahsis Marfu, Ketua MUI Kecamatan Petarukan,Kabupaten Pemalang, tanggal 15 Maret 2007

¹⁹ Wawancara dengan KH. Zaenuri Nadi, Ketua PCNU Kabupaten Pemalang, tanggal, 14 April 2007

organisasi NU tidak lagi berpolitik praktis. Namun demikian tidak menghilangkan hak bagi warga NU untuk berpolitik. NU mempunyai misi dikembangkan untuk kemasyarakatan sebagai pengalaman Ahlul sunnah wal Jamaah”

Pernyataan di atas, didukung oleh responden yang lain. Bahkan salah seorang responden yakni Drs. Ahmad Najib²⁰ menambahkan berdasarkan Mukhtar NU dan Mukerwil NU Jawa Tengah, maka PKB bukanlah satu-satunya sarana aspirasi politik warga NU. Bagi warga NU yang berada di partai politik lain harus sesuai dengan ajaran NU dan harus diayomi karena masih mempunyai hubungan batin dengan NU dan terlebih sekarang telah lahir PKNU (Partai Kebangkitan Nusantara – Partai ini berbasis pada kultur Nahdlatul Ulama.

Berkaitan dengan munculnya partai-partai politik Islam, para responden nampaknya tidak berkeberatan dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kehadiran partai-partai politik Islam dalam suatu negara yang demokratis adalah merupakan suatu hal wajar. Bahkan keberadaan partai-partai politik Islam tersebut bisa menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap keberadaan partai politik yang lain. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa responden telah dapat memahami makna demokrasi dan memiliki prinsip sikap tasamuh yakni bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat dalam beragama, kehidupan sosial dan budaya.

²⁰ Wawancara dengan Drs. Ahmad Najib, Ketua Ma'arif NU Cabang Pemalang, tanggal 20 Maret 2007

Menurut penuturan DRS. Muntoha Ketua PPP Kabupaten Pemalang merasa senang akan keberadaan PKB bahkan akan lahir PKNU(Partai Kebangkitan Nusantara) mereka semua menjadi mitra sekaligus media perjuangan menyalurkan visi dan misi Nahdlatul ulama di Kabupaten pemalang dalam mewujudkan maslahat umatan rohmatan lil ‘alamin ²¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²¹ Wawancara dengan Drs.Muntoha, Ketua PPP Kabupaten Pemalang ,tanggal 27 Maret 2007

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Nahdatul Ulama dan Politik Kebangsaan

Pada awalnya NU didirikan sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan (jamiyah diniyah) dan sekaligus berjuang untuk mengusir penjajah bersama dengan organisasi-organisasi lainnya. NU aktif di gelanggang politik praktis pada tahun 1927 sebagai tulang punggung Majelis Islam A'la Indonesia (MAI), dan tokoh pendiri NU, yaitu KH. Hasyim Asari sebagai ketua tertinggi¹.

Arena perjuangan politik NU makin melebar ketika Jepang menguasai Indonesia. NU termasuk organisasi yang dilarang Jepang, tetapi sepak terjang politik NU sudah tidak mungkin lagi dibendung. Pada tanggal 4 - 7 Nopember 1945, NU bersama Muhammadiyah, Perserikatan Ulama Indonesia dan Persatuan Umat Islam di Yogyakarta. Ini merupakan puncak pengabdian dan peran politik MIAI sehingga kongres memutuskan membentuk satu-satunya partai politik Islam, yang diberi nama Masyumi

¹ Asmawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, (Jakarta: Titian Illahi Press, 1999) ,hal.13.

Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Islam, dalam perkembangan selanjutnya ternyata tidak bisa lepas dari konflik internal. Konflik internal ini dinilai oleh NU sudah terlalu memuncak dan tidak bisa ditolerir lagi, sehingga tokoh-tokoh NU membuat keputusan yang sangat mendasar yaitu keluar dari Masyumi. Keterlibatan NU di Masyumi hanya berlangsung selama tujuh tahun.

Keputusan NU ini diambil dalam sebuah konferensi NU se-Jawa dan Madura di Jombang (1952). Keputusan konferensi Jombang tersebut dibahas kembali dalam muktamar NU di Palembang, 28 April – 1 Mei 1952. Akhirnya Muktamar NU mengukuhkan konferensi Jombang.

Bila ditelusuri secara mendalam, ada beberapa alasan yang mendasari keputusan NU keluar dari Masyumi. Titik pangkalnya adalah keputusan Muktamar Masyumi ke-4 yang dinilai terlalu mudah mengubah Majelis Syuro. Majelis ini pada awalnya mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan kebijaksanaan partai, statusnya diubah hanya berfungsi sebagai penasehat. Pendegradasian status Majelis Syuro tersebut dianggap sebagai tujuan untuk memblokir peranan NU dalam setiap mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan arah partai. Selain itu, tokoh-tokoh NU merasa selalu mendapat sindiran yang cukup pedas dari tokoh-tokoh Masyumi dan

non NU, yang umumnya berpendidikan formal dari Eropa dan Amerika (barat). Tokoh NU dinilai tidak pantas memimpin partai politik, mereka hanya pantas memimpin dan mengurus pesantren dan menjadi imam masjid.

Sebagai kelanjutan dari upaya mempersempit gerak dan peran tokoh-tokoh politik NU di Masyumi, maka dalam pembagian jatah kursi di DPR NU hanya diberi delapan kursi. Ini merupakan langkah yang tidak adil dan tidak proporsional mengingat NU mempunyai massa anggota yang tidak sedikit. Dalam perkembangan berikutnya, meskipun NU hanya punya kesempatan tiga tahun dalam melakukan konsolidasi dan persiapan mengikuti Pemilu 1955, hasilnya cukup mencengangkan banyak pengamat dan politisi, ternyata NU mampu tampil sebagai empat besar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI dalam perolehan suara pemilih dengan 45 kursi di DPR.

Sukses NU pada pemilu 1955, ternyata semakin dikukuhkan dalam Pemilu 1971. Dalam pemilu yang pertama kali diadakan di masa pemerintahan Orde Baru, NU bahkan berhasil menaikkan jumlah kursinya di DPR, dari 45 kursi menjadi 58 kursi. Hasil ini berarti nomor dua perolehan kursi di bawah Golkar.

Pada tanggal 5 Januari NU sebagai partai politik harus bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena PPP

sebagai fusi dari empat partai Islam yaitu Parmusi, PSII, Perti dan NU. Pada awal pembentukan PPP, peranan para tokoh NU sangat mendominasi dan berada di hampir semua jabatan strategis. Peranan tokoh NU yang cukup dominan di dalam tubuh PPP, sebetulnya merupakan hal yang sangat wajar mengingat perolehan pada pemilu sebelumnya tahun 1971, NU paling banyak memperoleh suara dibandingkan dengan tiga partai Islam yang sama-sama bergabung di PPP.

Sebenarnya kehidupan kepartaian di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Konflik internal selalu saja terjadi, baik di tubuh PPP maupun PDI. Persoalan utama adalah belum tuntasnya fungsi partai. Partai hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi perseorangan, namun secara organisatoris, partai pendukung tetap eksis seperti halnya NU dan MI. Selain itu persaingan masing-masing unsur dalam tubuh PPP juga membuat partai ini tidak tentram dan harmonis, lebih-lebih saat PPP dipimpin oleh Dr. H.J. Naro. Pada periode inilah NU dicabik-cabik, dipinggirkan dan diperkecil di dalam partai².

Puncaknya adalah pada Mukhtamar PPP di Ancol, Jakarta Utara tahun 1984. Tokoh-tokoh NU yang dinilai idealis tidak diberi posisi sama sekali dalam era kepemimpinan Dr. HJ Naro. Padahal semua

² Ibid, hal.17.

orang tahu, merekalah tokoh yang cukup berhasil mendongkrak suara PPP. Pembersihan tokoh-tokoh NU juga terjadi di daerah-daerah (kepengurusan wilayah cabag). Begitu juga lembaga Majelis Syuro yang selama ini dipegang tokoh NU, kemudian dihapus sama sekali.

Melihat kondisi yang kurang menguntungkan ini, ditambah terus berlanjutnya konflik internal terutama antara NU dan MI. NU akhirnya mengambil sebuah keputusan tegas kembali ke khitah 1926 dan tidak lagi aktif di gelanggang politik praktis serta menjaga jarak yang sama dengan ketiga kekuatan sosial politik yang ada. Keputusan mendasar yang sangat strategis itu diambil dalam Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984.

Walaupun NU telah menyatakan tidak berpolitik praktis, bukan berarti warga NU tidak boleh bermain politik, sebab pada prinsipnya beraktivitas di gelanggang politik praktis adalah hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin undang-undang, termasuk warga NU. Tetapi bagi NU yang boleh terjun ke politik praktis adalah perseorangan bukan atas nama organisasi.

Setelah Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, NU memulai gerakan barunya. Istilah gerakan baru di sini bukan dalam arti konteks suatu temuan, melainkan lebih kepada kiprah NU yang tidak berpolitik praktis, setelah secara organisatoris menyatakan mampu dan

keluar dari keterikatan formalnya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lepasnya keterikatan ini mengandung idealisme untuk lebih mengembangkan dan membumikan ideologi gerakan NU yang berangkat dari Paradigma “Nahdlatul Wathon” (kebangkitan gerakan kebangsaan), “Nahdlatul Tujjar” (kebangkitan gerakan ekonomi kerakyatan) dan “Nahdlatul Fikkar” (kebangkitan gerakan pemikiran). Ketiga paradigma itu merupakan elemen substansial khittah 1926 sebagai upaya perwujudan dari gerakan NU yang berhaluan Ahlusunnah Wal Jama’ah³

Walaupun demikian warganya bebas berpolitik atau menentukan kiprah politiknya sendiri-sendiri, sebagaimana warga negara lainnya. Di dalam NU sendiri, secara riil ada fraksi politik, di mana secara formal mereka berkiprah di salah satu orsospol. Bagi faksi politik, kendati mereka itu tak boleh mengata namakan NU, namun siapapun tahu, bahwa mereka menggunakan basis massa NU sebagai kekuatan tawar-menawarnya. Apalagi kalangan kyai yang selain memiliki pesantren juga sebagai politisi, basis massanya tak diragukan lagi, riil dan kuat.

Makanya dapat dipahami, bila NU terus dilirik ketiga orsospol dan tokoh-tokoh politik pun selalu berupaya dekat dengan para tokoh

³ Laode Ida dan Tantowi Jauhari, *Gus Dur diantara Keberhasilan dan Kenestapaaan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1999), hal.9-10.

NU. Tetapi sukar disangkal, walaupun diposisikan netral, tidak sedikit warga NU yang belum beranjak dari pilihan politik tradisionalnya ke PPP. Padahal sejak awal kembali ke khittah 1926, misalnya dalam pemilu 1987 lalu, beberapa tokoh pernah melakukan penggembosan terhadap PPP, agar warga NU beralih ke Golkar. Penggembosan itu tampaknya karena antara lain adanya kekecewaan beberapa tokohnya terhadap PPP.

Tetapi ada yang menarik dari perkembangan terakhir, yakni sikap dari sebagian warga NU terhadap PDI. Tampaknya komunitas bawah NU pun semakin menunjukkan keterbukaannya, seakan menyatakan terbuka bagi PDI. Kondisi hubungan seperti ini paling tidak didorong dua hal : pertama, faktor sejarah hubungan NU-PNI (Partai Nasional Indonesia) pada zaman kepemimpinan Presiden Soekarno; kedua, perkembangan politik dewasa ini di mana muncul kedekatan antara Gus Dur – Megawati itu sering dikatakan pribadi, namun bagaimanapun memiliki simbol dan makna politis yang bisa berimplikasi terhadap pilihan-pilihan politik alternatif ke PDI bagi warga NU.

Di era reformasi ini adalah hal yang wajar bila warga NU berkeinginan mempunyai “rumah politik” sendiri. Sebagus-bagusnya “rumah” orang, memang lebih nikmat dan nyaman di “rumah” sendiri

yaitu sebuah partai politik yang bisa memberikan tempat untuk warga NU dulu berperan secara optimal.

Perspektif sejarah tersebut memberikan wawasan dengan politik NU masa sekarang, ada dua hal yang sifatnya faktual yang kelihatannya kontradiktif. Pertama, bahwa sesuai khittah 1926 “secara kelembagaan NU tidak bisa terlibat dalam panggung politik dan tidak boleh terikat sesuatu kekuatan politik praktis—manapun. Kedua, berdasarkan pertimbangan adanya keperluan membuat nilai tambah bagi jamiyah NU ke tengah percaturan politik nasional, maka PBNU memfasilitasi berdirinya partai yang menampung aspirasi sebagian besar warga NU.

Pasca Sidang Umum MPR 1999, masalah khittah 1926 (sebagaimana diputuskan melalui Mukhtar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984) kembali mengemuka, padahal selama lima tahun lebih perdebatan soal itu sudah berkurang. Nilai-nilai khittah NU dengan gerakannya yang sudah dirintis 15 tahun sepertinya menjadi goyah. Pernyataan era NU kembali ke khittah dan melakukan gerakan budaya, nyaris gugur akibat ketergodaan elit NU untuk memasuki struktur kekuasaan, mengakomodasi, memfasilitasi bahkan menjadi deklarator partai politik formal (Partai Kebangkitan Bangsa).

Perkembangan pelaksanaan khittah NU selama ini justru mencemaskan karena perilaku beberapa tokoh NU sendiri, misalnya

ketika Gus Dur menjadi ketua PBNU sering tidak bisa menempatkan diri sebagai ketua PBNU dan aktivis partai. Padahal khittah 1926 telah jelas mengatur tata cara berorganisasi dan berpolitik. Oleh karena itu antara kegiatan politik dan non politik di tubuh NU harus ditata dengan baik

Mewakili pandangan orang di internal NU, komitmen untuk kembali ke khittah 1926 yang ditetapkan pada tahun 1984, seharusnya menjadi titik temu warga NU dalam memandang organisasinya. Namun pada kenyataannya ternyata khittah NU belum terlaksana dengan baik, bahkan menjadi titik pertentangan.

Kelahiran NU merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang mempunyai mata rantai hubungan dengan berbagai keadaan, peristiwa yang dialami bangsa Indonesia sebelumnya, dengan latar belakang tradisi keagamaan, masalah sosial politik, dan cultural yang terjalin dalam suatu keterkaitan. Para ulama pada umumnya telah memiliki jamaah (komunitas warga yang menjadi anggota kelompoknya) dengan ikatan hubungan yang akrab, terbentuk dalam pola hubungan kyai-santri, terutama pada masarakat di lingkungan pondok pesantrennya. Pola hubungan santri –kiai ini telah mampu mewarnai ,bahkan membentuk subkultural tradisionalis Islam tersendiri di Indonesia. Oleh karena itu kehadiran NU dipandang sebagai upaya

untuk mewadahi, melembagakan, mengembangkan langkah-langkah kegiatan serta gerakan para ulama yang telah dilakukan dan berlangsung sebelumnya. Para Ulama pondok pesantren yang tergabung dalam NU secara umum dapat dikatakan memiliki kesamaan wawasan pandangan dan tradisi keagamaan yang berlandaskan paham Ahlussunnah wal jama'ah. Dengan demikian, pembentukan NU dan proses kelahirannya tidak bisa terlepas dari usaha para ulama untuk mempertahankan dan mengembangkan paham keagamaan ahl al-sunnah wa aljama'ah, perkembangan dunia Islam pada umumnya, terutama dengan perkembangan gerakan modernisasi Islam serta situasi kolonialisme Belanda di Indonesia.

Dalam anggaran Dasar Pendirian NU (Statuten) yang disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 6 Pebruari 1930.N0.IX (Gedeponceerd.21743) ditegaskan “adapun maksud perkumpulan ini ,yaitu memegang teguh pada salah satu dari mazhabnya Imam empat ,yaitu Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Malik bin Anas,Imam Abu Hanifah an-Nu'man atau Imam Ahmad bin Hambal pasal 2).

Untuk mencapai maksud tersebut dalam pasal 3 dinyatakan usaha-usaha yang dilakukan ,yaitu:

- a. Mengadakan perhubungan di antara Ulama-ulama” yang bermadzhab tersebut dalam pasal 2
- b. Memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar ,supaya diketahui apakah itu dari kitab-kitab Ahlus sunnah wal jama’ah atau kitab-kitab Ahli bid’ah.
- c. Menyiarkan agama Islam di atas madzhabb sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dengan jalan apa saja yang baik. Pernyataan ini hingga sekarang masih tetap dipertahankan dengan perumusan yang tegas dan bahkan dalam Anggaran Dasar (Munas NU 1997)

Paham ini menjadi aqidah seperti tercantum dalam Bab II pasal 3 bahwa :NahdlatulUlama sebagai jam’iyah diniyah Islamiyah beraqidah Islam menurut paham ahlus sunnah wal jama’ah dan menganut salah satu madzhab empat :Hanafi, Maliki, Syafi’i ,dan Hambali.Demikian pula ditegaskan pada Tujuan dan Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan pasal 7(a) Anggaran Dasar 1997.⁴ Penggunaan kata ulama berarti orang yang berilmu.Ulama merupakan gelar dan nama panggilan yang sering disebut juga kiai.Tidak semua orang yang berilmu agama dikatakan ulama atau kiai.Untuk bisa dipanggil ulama / kiai disamping harus mempunyai kedalaman ilmu agama ,juga harus terlebih dahulu menemui jalur

⁴ S. Rozikin, *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hal .44.

mengaji di pesantren dan yang dikaji adalah kitab-kitab (sebutan untuk buku/karya tulis berbahasa arab di kalangan santri) pada umumnya kitab klasik. Oleh karena itu ,seorang ilmuan Islam yang tidak melalui jalur pesantren dan atau tidak melalui jalur nasab / keturunan atau perkawinan dengan keturunan ulama / kiai, sulit untuk mendapatkan gelar atau panggilan ulama / kiai⁵

Menurut K.H. Sahal mahfudh ada beberapa pertimbangan mendasar peran ulama dalam NU: pertama ,sebagai organisasi keagamaan NU harus menjadikan kekuatan sentralnya pada tokoh-tokoh yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, ilmu, amal dan akhlak keagamaannya. Pertimbangan ini didasarkan pada suatu hadis yang diungkapkan oleh KH.Hasyim As'ari dalam khatimah Qonun Asasi-“ Janganlah kalian menangisi agama bila ia dikuasai oleh ahlinya,dan kalian tangisilah agama itu, bila ia dikuasai oleh yang bukan ahlinya “Para ulama sebagai pewaris Nabi yang mampu melanjutkan risalahnya, tentu saja dipandang paling mendekati tuntutan tersebut.,Kedua,seorang ulama yang paling kecil di lingkungannya pun selalu mempunyai kewibawaan dan pengaruh atas santri dan murid-muridnya.Ulama juga mempunyai jalur kewibawaan langsung dengan masarakat sekeliling yang dapat menembus batas-batas kelompok

⁵ ibid, hal.76.

organisasi, batas kedaerahan atau lebih luas lagi. Ketiga, bahwa hubungan ulama dengan santrinya tidak terputus dengan berakhirnya proses belajar mengajar dipesantren/majlis ta'lim.⁶

Dalam konteks seperti ini dapat dipahami perjalanan NU selanjutnya. Melalui media pesantren para ulama mengemban tugas melaksanakan jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Ketika dirasakan perlunya mengembangkan kelembagaan tradisi sosial dan kultural yang telah hidup di tengah masyarakat ke arah bentuk yang lebih formal dengan spektrum visi yang lebih luas maka didirikan organisasi sosial keagamaan sebagai jembatan untuk mengantisipasi tugas tersebut. NU merupakan salah satu wujud dari upaya itu. Dimulai dari akar pesantren para ulama muda pesantren merintis kegiatan-kegiatan jihad mereka. Dari perhimpunan keagamaan seperti Nahdatul Watan, Taswirul Afkar kemudian NU. Tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa kegiatan ulama pesantren membentuk organisasi sosial keagamaan jauh sebelum NU lahir, merupakan embrio bagi kelahiran NU. Suatu tahap perkembangan obsesi mereka untuk mewujudkan negeri merdeka, obsesi untuk menempatkan syariah sebagai bagian dari kehidupan kebangsaan mereka.

⁶ ibid , hal.77.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa motif utama yang mendasari gerakan para ulama membentuk NU ialah motif keagamaan sebagai jihad fisabilillah. Aspek kedua yang mendorong mereka ialah tanggung jawab pengembangan pemikiran keagamaan yang ditandai upaya pelestarian madzhab ahlussunnah waljamaah. Ini tidak berarti statis, tidak berkembang, sebab pengembangan yang dilakukan justru bertumpu pada akar kesejarahan mereka sehingga pemikiran yang dikembangkan itu memiliki konteks historis. Aspek ketiga ialah dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, sosial dan ekonomi. Ini ditandai dengan pembentukan Nahdatul Watan, Taswirul Afkar, dan Ta'mirul Masjid. Aspek keempat ialah motif politik yang ditandai semangat nasionalisme ketika pendiri NU itu mendirikan cabang SI di Mekkah serta obsesi mengenai hari depan negeri merdeka bagi umat Islam.

Berbagai pemecahan masalah yang dilakukan NU untuk mengatasi problematik yang muncul di lingkungan umat Islam sendiri maupun bangsa Indonesia umumnya selalu terlihat semangat rekonsiliasi, toleran dan dialog. Meskipun di sana-sini terlihat ketegangan-ketegangan struktural yang mengesankan pendekatan berorientasi kalah-menang, namun secara umum tidak menutup sikap dasar NU tersebut. Pada umumnya NU, juga di kalangan internnya

sendiri, tidak mengklaim pendapat-pendapatnya mutlak benar tanpa memberi kesempatan dialog yang memberi kemungkinan keragaman pemecahan sesuai dengan kondisi tertentu. Hal ini misalnya terlihat pada sikap-sikap NU (barangkali juga pemimpin Islam umumnya) ketika awal kemerdekaan untuk merumuskan dan mengesahkan UUD 1945, berbagai kemelut politik tahun lima puluhan dan terakhir asas tunggal Pancasila.

Sudah tentu semua itu dilihat dalam spektrum kesejarahan, sebagai interaksi Islam dalam konteks sejarah, setidaknya Islam menurut visi yang dikembangkan NU. Proses interaksi ini dengan sendirinya memiliki watak kesejarahan yang nisbi dan tidak boleh dianggap mutlak kebenarannya. Oleh karena itu dengan model-model pendekatan pemecahan masalah sosial politik yang dilakukan NU masih tetap terbentang kemungkinan pemecahan yang solusinya berbeda.

2. Aspek Fikih Dalam Politik

Tahun 1935 muktamar NU di Banjarmasin membuat keputusan dalam kaitan dengan pembelaan negeri dari ancaman musuh bahwa Indonesia adalah negeri muslim (dar al-Islam). Dalam kenyataan Indonesia waktu itu dikuasai penjajah Belanda, namun tidak menghalangi NU membuat keputusan itu, karena kenyataan mayoritas

penduduknya beragama Islam dan umat Islam bebas menjalankan syariat agama. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan adalah wajib membela negeri yang mayoritas penduduknya muslim dari ancaman musuh.

Konsep hukum fikih memberi kemungkinan mengenai hal ini dengan pembagian tiga jenis negara yaitu Islam (dar al-Islam), negeri damai (dar al-sulh), dan negara musuh (dar al-harb). Negara Islam adalah negara yang memenuhi kualifikasi tertentu sebagai negara Islam, undang-undang berdasar Islam dan pemegang kekuasaannya adalah orang Islam. Negara damai adalah negara yang memberi jaminan kebebasan kepada umat Islam menjalankan syariat agama namun tidak memuat legalitas undang-undang negara menurut syariat Islam. Negara musuh adalah negara yang jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin. Dua bentuk negara yang pertama harus dipertahankan dari ancaman musuh karena syariat Islam dapat dilaksanakan oleh kaum muslimin. Walaupun syariat Islam tidak berlaku secara formal di Indonesia waktu itu, tetapi negeri ini dahulunya merupakan negeri Islam yang diperintah oleh raja-raja Islam dan kaum muslimin bebas menjalankan agama. Ini menjadi alasan mengapa NU membuat keputusan untuk melindungi tanah air dan bangsa dari ancaman

timbulnya anarki yang lebih besar tanpa melihat sistem kekuasaan yang berlaku.

Menjelang kemerdekaan NU melalui wakil-wakilnya turut serta merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Pergulatan perjuangan kemerdekaan itu disusul resolusi jihad yang mewajibkan umat Islam membela negara yang baru diproklamasikan sebagai jihad fisabilillah. Sikap NU ini merupakan tahap lanjutan dari sikap sebelumnya. Sebelumnya NU mengakui tumpah darah dan tanah air Indonesia sebagai wilayah yang harus dilindungi karena wilayah itu adalah wilayah negeri Islam, maka ketika kemerdekaan Indonesia diakui sebagai negara berdaulat yang sah harus dibela dari ancaman penjajahan Belanda.

Setelah itu tahap pengakuan kepada kekuasaan pemerintahan negara melalui keputusan konferensi alim ulama bahwa presiden dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan penyelenggara kenegaraan dengan sebutan waliyul amr al-daruri bi al-syaukah. Tahap akhir dari sikap NU selanjutnya ialah penerimaan pancasila sebagai asas bernegara, dan selanjutnya juga diakui sebagai asas berbangsa dan bermasyarakat. Rentetan peristiwa tersebut menunjukkan konsistensi sikap-sikap NU dalam mengaplikasikan konsep-konsep fikih yang dianutnya untuk

menyelesaikan masalah dasar kehidupan kenegaraan di Indonesia. Konsep fikih sendiri tentang dar al-Islam cukup longgar dan pada tingkat tertentu tumpang tindih dengan konsep dar al-sulh. Seperti diketahui oleh al-Ghazali mengemukakan, mengemukakan kekuasaan bil al-syaukah diakui sebagai dar al-Islam sedang menurut yang lain termasuk dar al-sulh.

Dasar pemikiran NU untuk menyikapi gejala-gejala sosial politik di atas dengan pertimbangan beberapa kaidah fikih. Kaidah pertama ialah *ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh* berarti kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semuanya (bagian-bagian terpenting yang telah berhasil diwujudkan). Kenyataan bahwa negara Indonesia sudah terbentuk dan kekuasaan pemerintahan berfungsi melindungi esensi terpenting dari kehidupan kenegaraan harus diterima. Sudah tentu semula wujud formal negara yang memenuhi kualifikasi menurut syariat Islam yang diperjuangkan karena ini merupakan perintah agama yang harus diikuti. Hal itupun dilakukan NU dalam sidang BPUPKI maupun majelis konstituante. Namun setelah upaya itu gagal dilaksanakan kenyataan negara dan kekuasaan pemerintahan yang telah berfungsi tidak boleh ditinggalkan.

B. Pembahasan

1. Tingkat Sosial Politik Warga NU

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada umumnya Pengurus Cabang NU beserta jajarannya di semua level menyatakan sikap politik yang dilakukan bersifat netral sesuai dengan Khittah 1926. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa kebudayaan (budaya) politik NU cukup dominan mempengaruhi corak perilaku Pengurus Cabang NU di Pemalang.

Khittah NU sebagai acuan sosial politik bagi seluruh warga NU dalam menyikapi dan menentukan politik dapat di implementasikan secara netral, tidak berafiliasi pada perpol tertentu saja akan tetapi mampu menghormati perbedaan yang ada di pemalang, dan dapat menghormati kebebasan berpolitik

Pola perilaku politik warga NU dan pengurus di semua tingkatan cukup dewasa, moderat mampu mengimplementasikannya tanpa terjadi benturan fisik yang mengarah pada kriminal.

Perwujudan dari aktualisasi Khittah NU itu menunjukkan nilai, keyakinan, pengetahuan dan orientasi normatif tradisi politik NU di Pemalang dapat dipahami dengan baik . Sikap dan budaya politik warga NU di Pemalang ini akomodatif, moderat atau kooperatif tidak berarti meleburkan diri dalam kehendak kekuasaan dan kekuatan politik.

2. Hubungan NU dengan PKB dan Parpol yang lain

Bahwa secara organisatoris hubungan antara NU dengan PKB maupun parpol lain terpisah. NU adalah organisasi sosial keagamaan sedangkan PKB dan parpol lain merupakan orsospol (organisasi sosial politik). Namun demikian menurut responden sebenarnya antara NU dengan PKB memiliki hubungan emosional dan historis, sebab PKB dirintis dan dilahirkan oleh sejumlah warga NU. Disamping itu antara NU dengan PKB memiliki hubungan aspiratif serta kultural.

Sejauh ini hubungan antara pengurus NU dengan PKB cukup baik. Termasuk dengan parpol yang lain. Data lain menunjukkan bahwa hubungan antara Pengurus Cabang NU Pematang dengan Pengurus PKB demikian bervariasi yakni ada pengurus NU yang tidak pernah berhubungan, jarang berhubungan dan sering berhubungan. Tentang pola hubungan pengurus NU dengan PKB dapat dibaca dalam tabel :

Tabel 5

Hubungan Pengurus NU dengan PKB.

Intetitas Hubungan	Jumlah	Prosentase (%)
Sering	5	50
Jarang	4	40
Tidak pernah	1	10
Total	10	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Responden , 2007

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian (50%) responden ternyata sering berhubungan dengan pengurus PKB dari tingkat ranting sampai tingkat pusat. Data lain sebagaimana disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa 40 % menyatakan jarang berhubungan dengan pengurus PKB, sedangkan sebagian kecil sekali yakni 10 % tidak pernah menjalin hubungan dengan pengurus PKB. Meski demikian, pengurus NU yang tidak pernah berhubungan dengan PKB tetap mengakui pentingnya NU secara kelembagaan membangun hubungan yang baik dengan siapapun termasuk PKB. Hal itu menggambarkan kedekatan hubungan antara Pengurus Cabang Harian NU Kabupaten Pemalang dengan pengurus PKB cukup baik.

Dari informasi yang diperoleh, ternyata intensitas hubungan Pengurus Cabang NU dengan pengurus PKB lebih banyak dilakukan pada semua tingkat baik di cabang, MWC maupun ranting. Hal ini bisa dimaklumi karena hubungan mereka dengan civitas partai PKB Pemalang selama ini relatif baik. Walaupun secara organisatoris dan struktural hubungan antara NU dengan PKB terpisah, namun memiliki hubungan yang bersifat emosional dan historis. Hubungan yang selalu dipelihara agar berlangsung harmonis antara NU dengan PKB yang menggambarkan sikap moderat yang cenderung akomodatif tetapi tidak

harus pragmatis tampaknya lebih menggambarkan pola hubungan kepentingan.

Tabel 6

Pengaruh Positif Sikap Politik NU

Pengaruh positif	Jumlah	Prosentase (%)
PKB diharapkan memperjuangkan kepentingan politik warga NU	6	60
NU akan memiliki kewibawaan	3	30
Semakin dekatnya NU-PKB	1	10
Total	10	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Responden , 2000

Tabel 6 menunjukkan dengan jelas bahwa dengan perilaku politik yang moderat, sebagian besar responden (60%) mengakui bahwa PKB diharapkan akan memperjuangkan kepentingan politik warga NU, sedangkan sebagian responden (30%) beranggapan NU akan semakin berwibawa.

Sementara itu menurut informan, kedekatan antara pengurus NU dengan PKB juga memberikan dampak positif, diantaranya pengembangan kegiatan atau dakwah NU dalam mengemban visi dan misi sebagai pelaku dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dibantu serta mendapat kontribusi dana sukarela dari pengurus PKB. Namun

kedekatan antara NU dengan PKB, tidak akan mempengaruhi sikap kritis pengurus NU terhadap PKB.

3. Perubahan Sikap Warga NU pasca Khittah 1926 dalam Menyikapi Pemilu

Dalam menentukan aspirasi politiknya pada setiap pemilu pasca khittah 1926, warga NU diberikan kebebasan untuk memilih. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua warga NU itu menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB mereka ada yang memilih ke partai lain . Tentu saja pilihan mereka didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terhadap sikap warga NU tersebut, hampir seluruh responden memberikan kebebasan menentukan pilihannya. Hal itu merupakan hak asasi politik setiap warga negara. Namun diharapkan warga NU yang berada di partai politik tetap bisa memperjuangkan kepentingan NU. Berikut ini pengakuan salah seorang responden yaitu Drs. Ali Subhi¹³, menyatakan bahwa dirinya tidak akan mempengaruhi aspirasi politik seseorang pada pemilu. Terhadap warga NU tidak memilih PKB ataupun partai yang lainnya ia tidak akan mempermasalahkan pilihan mereka. Pada dasarnya warga NU bisa memperjuangkan NU dimanapun mereka berada, termasuk di dalam partai politik yang lain.

Berkaitan dengan sikap politis Pengurus Pemalang dalam menghadapi Pemilu , maka hasil wawancara diperoleh data bahwa

¹³ Wawancara dengan Drs. Ali Subhi, Ketua PMWCNU Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tanggal 10 April 2007

seluruh responden menunjukkan sikap politik yang netral tetapi memberikan dukungan kepada PKB. Sikap politik yang netral dalam lingkungan NU memiliki makna tidak berafiliasi dengan dan tidak merupakan bagian dari kekuatan politik apapun serta bebas melakukan pilihan politik sesuai dengan hak asasi masing-masing sebagaimana semangat khittah 1926. Pada umumnya responden memberikan alasan dari sikap netral tersebut karena dilandasi oleh semangat Khittah 1926. membawa misi NU sesuai dengan semangat Khittah 1926 yang memisahkan antara NU dengan PKB dan partai yang lain secara organisasi .

Disamping itu sebagian responden yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mengakui disamping sikap netral itu sejalan dengan Khittah 1926, juga karena adanya konsekuensi tanggung jawab sebagai abdi negara untuk bersikap netral terhadap partai politik yang ada di Indonesia. Seorang pegawai negeri sipil dituntut untuk bisa melayani semua lapisan masyarakat dan tidak bersikap diskriminatif. Menurut pengakuan responden yang juga seorang PNS yakni Drs.H.Mudasir Mas'ud, MAG¹⁴, wawancara tanggal 16 Maret 2007 mengenai alasan sikap politiknya, di satu pihak ia menjadi pengurus NU yang seyogyanya bisa membimbing warga NU agar menggunakan hak

¹⁴ Wawancara dengan Drs. H. Mudasir Mas'ud, Kepala MAN Pemalang dan Wakil Ketua Tanfidz PCNU Cavang Pemalang, tanggal 16 Maret 2007

pilihnya sesuai dengan ajaran NU. Namun dipihak lain ia menjadi pegawai negeri yang harus bersikap netral.

Sikap politik yang ditunjukkan oleh Pengurus Cabang NU Pemalang untuk tetap netral terhadap partai politik, ternyata tetap dijaga konsistensinya. Hal ini seperti dituturkan oleh para Pengurus Cabang NU Pemalang, yaitu dalam masa kampanye pemilu yang telah berlalu pasca khitoh 1926 Pengurus Cabang NU Pemalang tetap tidak tergiring untuk menjadi fasilitator atau menyediakan diri sebagai ajang untuk melakukan kampanye bagi kepentingan partai politik tertentu. NU tetap komitmen sebagai organisasi sosial keagamaan dan tidak akan melakukan politik praktis. Pengurus Cabang Harian NU hanya sebatas memfasilitasi kelahiran DPC PKB. Dukungan terhadap PKB lebih bersifat pribadi dan tidak mengatasnamakan NU secara kelembagaan. Berikut penuturan Drs.H.Masruri¹⁵, wawancara tanggal 4 Maret 2007

“Kalau secara organisatoris, Pengurus NU disemua tingkatan tidak pernah menjadi fasilitator atau menyediakan diri sebagai ajang kampanye Partai apapun selama masa kampanye berlangsung. Hal ini untuk menjaga konsistensi NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan tidak melakukan politik praktis. Namun secara individual dipersilahkan untuk berpartisipasi demi kemajuan bangsa .

¹⁵ Wawancara dengan Drs.H. Masruri, Ketua PMWCNU Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, tanggal 4 Maret 2007

Konsistensi untuk tetap berpegang pada Khittah 1926 dan AD/ART/ NU, berlaku juga terhadap pengurus NU secara pribadi. Walaupun secara pribadi Pengurus NU boleh melakukan kampanye untuk kepentingan partai politik sebagai manifestasi hak politik setiap warga negara. Namun pada umumnya para responden sepakat bahwa pengurus yang bersangkutan harus siap dinonaktifkan sementara selama kampanye berlangsung. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut penuturanb Pengurus Cabang NU yakni Shofi Sholeh, yang menyatakan NU akan menegur pengurus yang ikut juru kampanye¹⁶.

Sikap netral yang ditunjukkan oleh Pengurus Cabang NU Pemalang, dibenarkan oleh sejumlah informan. Menurut informasi selama kampanye berlangsung PCNU Pemalang tidak pernah menjadi fasilitator atau menyediakan diri sebagai ajang kampanye PKB, PCNU hanya sebatas memfasilitasi DPC PKB. Di samping itu selama kampanye berlangsung tidak ada Pengurus Cabang NU Pemalang yang menjadi juru kampanye bagi PKB. Kegiatabn politiknya hanya sebatas menghadiri undangan kampanye atas nama priobadi, namun bukan untuk menjadi juru kampanye.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden mengenai rangkap jabatan dalam kepengurusan NU diperoleh

¹⁶ Wawancara dengan Sofi Sholeh, BA, Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Pemalang Periode 2005-2008, tanggal 20 Maret 2007.

kesimpulan bahwa pada umumnya tidak setuju terhadap pengurus NU yang mempunyai rangkap jabatan dalam suatu partai politik. Menurut penuturan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU Pemalang yakni KH. Zaenuri Nadi, bahwa berdasarkan anggaran rumah tangga (ART) NU maka Pengurus Harian Organisasi Sosial Politik. Termasuk Pengurus Harian NU dalam hal Syuriah dan Tanfidziyah sedangkan Mustasyar bukanlah termasuk dalam struktur Pengurus Harian NU. Komitmen Pengurus Cabang NU Pemalang untuk menegakkan disiplin akan tetap dijalankan sesuai dengan AD/ART.¹⁷ Dalam susunan kepengurusan cabang NU terdiri atas Mutasyar, Syuriah dan Tanfidziyah. Menurut sebagian besar responden, secara normatif Syuriah merupakan pimpinan tertinggi NU yang berfungsi selaku pimpinan pengendali, pengawas dan penentu kebijakan NU. Termasuk dalam ini yang paling berpengaruh pada khirnya ikut mempengaruhi orientasi politik NU. Namun menurut responden yang lain, secara teknis organisasi Tanfidziyah adalah pelaksana kepemimpinan organisasi, yang berarti langsung atau tidak langsung ikut mempengaruhi kebijakan NU. Salah seorang responden mengakui bahwa dalam prakteknya Syuriah kurang berfungsi secara maksimal karena lebih banyak mengurus soal-soal keagamaan sedangkan dalam pengambilan kebijakan organisasi lebih banyak dilakukan oleh

¹⁷ Wawancara dengan KH. Zaenuri Nadi, Ketua Tanfidzia PCNU Pemalang Periode 2003-2008, tanggal 10 April 2007

Tanfidziyah. Prosesi pemilu dari tahun ke tahun pasca khitoh NU 1926 di Kabupaten Pemalang makin kondusif ,tercipta ketenangan tanpa ada gejolak berarti ,walaupun dari berbagai pengurus ada yang menjadi tim sukses di orsosopol tertentu akan tetapi mereka mampu menempatkan diri pada posisi yang digariskan oleh dasar –dasar NU .



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, 1999, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, Jakarta : Titian Illahi Press.
- BPS (Badan Pusat Statistik Kab,Pemalang Jateng), *Kabupaten Pemalang dalam Angka 2005*
- Darwis, Ilyas, 1999, *Geger di Republik NU*, Jakarta: Penerbit Harian Kompas-Lakpesdam NU.
- El Kapim, 2004, *PBNU Perekat Bangsa 2001-2002*, Jakarta: 2004
- Fakih, Mansur dkk. 1997, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*. Jakarta: Pustaka.
- Fatoni dan Zen, 1992, *Nahdlatul Ulama Pasca khittoh*, Yogyakarta: Media Widyamandala.
- Hadi, Sutrisno, 1983, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hayat, Sholeh dkk, 2002, *Pedoman organisasi dan Administrasi Nahdlatul Ulama*, Surabaya, 2002, Jawa Timur
- Laode Ida dan Tantowi Jauhari, 1999, *Gus Dur diantara Keberhasilan dan Kenestapaan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Moleong, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Dirjen Dikti.
- Mulyana, Dedy, 2001, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Muzadi, Abdul Muchit, 2006, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Surabaya : Khalista

Purwadarminta, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.
Cet II.

S.Rozikin, 1999, *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU pasca Khittoh*,
Jakarta: Gramedia.

Sodiq, Muhammad , 2004, *Dinamika Kepemimpinan NU - Refleksi Perjalanan
K.H. Hasyim Muzadi*, Jawa Timur: Lajnah Talif Nasyr (LTN) NU
Jawa Timur-Cet 1.

Zuhri, Saifudin, 1978, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di
Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif.

_____(1993), *Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pelaksanaannya (UU RI N0 2 Th 1989)*, Jakarta .Sinar :
Grafika Cet IV.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Faesol
Nim : 03913093
Tempat Tgl Lahir : Pemalang, 16 September 1968
Alamat : Griya Taman Asri II Blok I No. 10 Rt. 07 Rw. 05
Desa Taman Kec. Taman – Kab. Pemalang

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Pemalang : Pemalang Th 1981
2. MTs Negeri Pekalongan : Pekalongan Th 1984
3. PGA Negeri Pekalongan : Th 1987
4. IAIN Walisongo – Semarang : 1993

Pemalang, 11 Mei 2007


Muhammad Faesol
NIM. 03913093